

ANALISIS KEBIJAKAN DAMPAK DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN, PEREKONOMIAN, PENGANGGURAN, DAN PELAYANAN PUBLIK PERIODE 2015-2019



ANALISIS KEBIJAKAN DAMPAK DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN, PEREKONOMIAN, PENGANGGURAN, DAN PELAYANAN PUBLIK PERIODE 2015-2019

Penulis

Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

**Analisis Kebijakan Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan, Perekonomian, Pengangguran,
dan Pelayanan Publik Periode 2015-2019**

ISBN: 978-623-6080-44-3

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©(2022) **Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)**

Pengarah:

Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum, DJPK, Kementerian Keuangan

Penulis:

Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.

Kontributor:

Annisa Dwi Paramitha

Chery Husada Sirat

Ferie Sulistiono

Herry Prananto

Imaddudin

Imam Mukhlis Affandi

Jamiat Aries Calfat

Kresnadi Prabowo Mukti

Mulyono

Prasetyo Indro Soedjono

Ricka Yunita Prasetya

Yadi Hadian

Wiyarto

Kontributor dan Penyunting:

Devi Suryani

Heracles Lang

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia Jalan Diponegoro No. 72 Jakarta Pusat, 10320 Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090.

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan dengan selesainya kajian “ Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan, Perekonomian, Pengangguran, dan Pelayanan Publik Periode 2015-2019”. Kajian ini dilakukan di Tahun 2020 pada awal masa pandemi covid-19 di Indonesia.

Sesuai dengan judulnya, kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Dana Desa terhadap beberapa variabel sosial ekonomi, antara terutama tingkat kemiskinan, pertumbuhan pendapatan penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pelayanan publik di Perdesaan dalam periode 2015-2019. Analisis juga dilakukan terhadap perubahan formulasi Dana Desa dalam periode tersebut.

Data yang digunakan dalam kajian sepenuhnya didapatkan secara online, terutama data dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) - Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk itu, terimakasih banyak kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan studi, terutama Direktorat Jenderal Perimbanganum Keuangan - Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bagian berbagai kajian evaluasi pengalokasian Dana Desa secara nasional dan berkontribusi sebagai masukan dalam perbaikan pengalokasian dan penggunaan Dana Desa.

Anna Winoto

Tim Leader KOMPAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengantar

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimulailah era desentralisasi fiskal tahap ke dua di Indonesia dengan adanya dana transfer langsung ke desa yang disebut sebagai Dana Desa (DD). DD mulai dialokasikan pada tahun anggaran 2015 dengan jumlah sebesar Rp 20,7 Triliun. Jumlah tersebut terus meningkat hingga menjadi Rp 72 Triliun di tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat terus sejalan dengan peningkatan pendapatan Negara dan jumlah Dana Transfer ke Daerah karena jumlah Dana Desa ditetapkan sepuluh persen *on top* dana transfer ke daerah.

Dari data *outcome* yang sudah tersedia hingga Juni 2020, era otonomi fiskal Desa dapat dikatakan telah berlangsung selama lima tahun (2015-2019). Berbagai penelitian antar daerah di Indonesia menunjukkan hasil dan dampak yang beragam. Terdapat hasil riset di daerah tertentu menyimpulkan bahwa dana desa tidak menurunkan angka kemiskinan, di sisi lain juga terdapat hasil penelitian di daerah yang menemukan bahwa dana desa berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

Dana Desa dan jumlah yang semakin membesar dan dengan pemanfaatan yang semakin beragam di tiap Desa, Kabupaten/Kota tentu dapat dimaklumi menghasilkan dampak yang bervariasi antar daerah. Namun, hingga saat ini, belum ditemukan kajian yang meneliti dampak Dana Desa terhadap berbagai indikator utama yang menggunakan data secara nasional. Dengan pengalokasian DD yang telah memasuki tahun ke enam, perlu kajian yang lebih komprehensif untuk menganalisis dampak DD terhadap kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Kajian ini sangat penting untuk dilakukan, sebagai bagian dari evaluasi dan basis untuk membuat kebijakan pengalokasian yang lebih efektif dan efisien.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

Menganalisis Dampak Dana Desa terhadap kemiskinan, pengeluaran penduduk, pengangguran dan pelayanan publik di Perdesaan dalam periode 2015-2019

Kerangka Teori dan Tinjauan Formula Distribusi Dana Desa

Transfer dana ke Pemerintahan Desa yang merupakan pemerintahan terdekat ke masyarakat akan meningkatkan kapasitas fiskal desa untuk melaksanakan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan kemudahan transportasi. Seterusnya Dana Desa berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan usaha mikro dan kecil melalui program pemberdayaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi warga desa. Peningkatan kegiatan ekonomi ini pada akhirnya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan di perdesaan.

Upaya optimalisasi dampak Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan layanan publik di daerah perdesaan khususnya, dapat dilakukan paling tidak melalui tahapan (a) formulasi dana desa dan (b) penggunaan dana desa. Tahapan formulasi akan menentukan jumlah dana desa untuk setiap desa. Distribusi yang kurang efisien tentu tidak akan menghasilkan dampak yang optimal. Variasi desa yang sangat lebar satu sama lain menjadi tantangan dalam menetapkan formula. Desa di Indonesia sangat beragam terkait ukurannya, lokasi, dan tingkat kemajuan. Sehingga untuk mencari formula yang *one size fits all* bukanlah sesuatu yang sederhana. Pada akhirnya tujuan dan sasaran dari keberadaan dana desa, serta prioritas dari Pemerintah akan sangat menentukan formula yang tepat.

Distribusi yang optimal saja tentu tidak cukup, karena pada giliran justru penggunaan dan pemanfaatan dana desa yang akan menentukan dampaknya bagi masyarakat. Penggunaan yang lebih dominan untuk yang bersifat konsumtif cenderung memiliki dampak jangka pendek saja. Sementara itu, penggunaan dana yang dominan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan, mungkin baru terasa dampaknya dalam jangka menengah dan Panjang. Variasi penggunaan dana desa antar wilayah akan menentukan dampaknya bagi variabel makro daerah. Meskipun demikian, berkaitan dengan dampak terhadap variabel makro di daerah, tentu dapat dipahami bahwa Dana Desa bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi. Variabel pengeluaran pemerintah selain dana desa, tentu juga akan sangat menentukan karena jumlahnya yang jauh lebih besar dari dana desa. Demikian juga variabel lainnya seperti peranan non-pemerintah (swasta dan organisasi non-profit), jumlah penduduk dan tingkat pembangunan manusia, dll.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam konteks skala ekonomi terdapat potensi inefisiensi dalam pengalokasian dana di level desa tersebut. Pembangunan infrastruktur desa, bisa saja lebih efisien ketika koordinasi lintas desa dilakukan. Pembangunan infrastruktur lintas Desa bisa saja lebih rendah biayanya dari pada tiap Desa membangun sendiri. Penyediaan layanan di Desa bisa lebih rendah biayanya jika beberapa Desa berkolaborasi menyediakan. Ukuran Desa yang lebih kecil akan meningkatkan biaya tetap administrasi,

sehingga terdapat potensi Dana Desa di-capture oleh elit Desa untuk. Sehingga ada kemungkinan, desentralisasi fiskal ke level Desa dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi alokasi.

Formulasi Dana Desa

Dana Desa didistribusikan ke Desa secara dua tahap seperti yang telah ditentukan oleh UU desa. Pertama adalah dari Pemerintah Pusat ke semua Kabupaten dan Kota yang memiliki desa. Tahap kedua adalah dari setiap Kabupaten atau Kota ke desa. Menurut UU No 6/2014 (penjelasan pasal 72), perhitungan dana desa untuk setiap kabupaten/kota didasarkan pada jumlah desa dan alokasi untuk setiap desa harus didasarkan pada populasi, jumlah orang miskin, area, dan kondisi geografis. UU tersebut juga menjelaskan dua tujuan alokasi dana desa, yaitu (1) untuk meningkatkan kesejahteraan dan (2) untuk pemerataan pembangunan desa. Lebih lanjut tentang formula untuk mendistribusikan dana desa diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016. Kemudian, ada juga Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang prosedur alokasi, transfer dana, penggunaan dana, dan pemantauan dan evaluasi dana.

Formula Dana Desa, baik untuk pendistribusian ke Kabupaten/Kota maupun pendistribusian ke Desa, pada awalnya terbagi ke dalam Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF). AD adalah pembagian secara merata ke semua Desa, sedangkan AF adalah pengalokasian berbasis variabel (populasi, area, jumlah penduduk miskin, dan kondisi geografis). Pendistribusian berbasis AD dan AF dilakukan hingga 2017. Formula kemudian mengalami perubahan pada tahun 2018 setelah diperkenalkan komponen Alokasi Afirmasi (AA) di tahun 2018 dan kemudian komponen Alokasi Kinerja (AK) di tahun 2020.

Formula Periode 2015-2017

Dana Desa pada tahun 2015, 2016 dan 2017, didistribusi menurut Alokasi Dasar sebesar 90 persen dan kemudian menurut variabel (Alokasi Formula) sebesar 10 persen. Dengan kata lain, sebesar 90 persen Dana Desa dibagi rata untuk setiap desa, tanpa mempertimbangkan ukuran desa dan variabel penentu kebutuhan belanjanya. Hanya 10 persen dana dialokasikan berdasarkan formula menggunakan empat variabel yaitu populasi, area, jumlah penduduk miskin, dan kondisi geografis. Distribusi dana dari Pemerintah Pusat ke setiap Kabupaten/Kota berdasarkan AF menggunakan variabel populasi, penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dengan bobot berturut-turut 25%, 35%, 10% dan 30%. Sedangkan AD untuk setiap Kabupaten/Kota ditentukan oleh jumlah desa dan AD untuk tiap desa. Metode yang sama selanjutnya juga digunakan untuk distribusi dana dari setiap Kabupaten/Kota ke Desa dengan perbedaan hanya pada penggunaan indeks kesulitan geografis (IKG) sebagai pengganti IKK.

Perubahan Formula pada 2018 hingga 2020

Pada 2018, formula untuk mendistribusikan dana diubah. Revisi ini dimaksudkan untuk menyediakan lebih banyak alokasi untuk desa-desa tertinggal dan untuk desa-desa dengan populasi miskin yang lebih tinggi (DJPk, 2018). Ini bisa menjadi respons Kementerian Keuangan terhadap kelemahan formula sebelumnya yang dibahas oleh berbagai penelitian seperti Lewis (2015) dan Handra et al. (2017). Dalam rumus 2018, ada tiga komponen alokasi, (1) Alokasi Dasar (AD), (2) Alokasi Afirmasi (AA) dan (3) Alokasi Formula (AF). Dana untuk alokasi dasar (jumlah yang sama untuk semua desa) dikurangi menjadi 77 persen dari total dana desa. Dana yang dialokasikan berdasarkan variabel (Alokasi Formula) ditingkatkan menjadi 20 persen. Kemudian, sisanya 3 persen dialokasikan untuk desa-desa tertinggal (Alokasi Afirmasi).

Selain itu, ada juga perubahan dalam AF. Bobot masing-masing variabel dalam AF sama sekali berbeda dari rumus sebelumnya. Dalam formula 2018, variabel populasi, penduduk miskin, luas dan indeks harga konstruksi (kesulitan geografis) secara berurutan tertimbang 10%, 50%, 15% dan 25%. Kemudian, untuk setiap tahap, alokasi untuk setiap Pemda atau setiap desa ditentukan oleh tiga komponen, Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi Formula (AF).

Klasifikasi desa untuk AA didasarkan pada Indeks Pengembangan Desa (Indeks Desa Membangun) yang diperkenalkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2015. Pemilihan Desa penerima AA didahului dengan mengurutkan desa berdasarkan jumlah penduduk miskin dari terkecil ke terbesar. Lalu diambil 30 persen desa dengan penduduk miskin terbesar, dan yang menerima AA hanyalah Desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. Jumlah AA untuk Desa sangat tertinggal lebih besar dari Desa tertinggal.

Untuk Tahun 2019, dengan formula yang sama dengan tahun 2018 dilakukan penurunan Alokasi Dasar menjadi 72%, sehingga pendistribusi dengan Alokasi Formula menjadi 25%, sedangkan Alokasi Afirmasi tetap di 3%. Dengan itu berarti, peranan variabel penentu kebutuhan belanja semakin meningkat, dimana didalamnya termasuk peranan variabel jumlah penduduk miskin. Untuk Tahun 2020, pendistribusian berbasis AD kembali diturunkan menjadi 69% dengan meningkatkan Alokasi Formula menjadi sebesar 28%. Selanjutnya diperkenalkan komponen Alokasi Kinerja (AK) dan tetap mempertahankan komponen Alokasi Afirmasi (AA). Porsi AA di tahun 2019 yang berjumlah sebesar 3% dibagi dua menjadi masing-masing 1,5% untuk AA dan 1,5% untuk AK.

Model dan metode analisis

Unit Analisis dari kajian ini yaitu level Kabupaten/Kota. Penelitian ini bersifat kuantitatif, baik inferensial maupun deskriptif yang didukung oleh data sekunder selama lima tahun terakhir 2015-2019. Model panel data digunakan untuk melihat pengaruh dana desa terhadap beberapa variabel.

Kesimpulan

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, antara lain:

1. Dana Desa periode 2015-2019 berdampak kepada penurunan kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap kenaikan dana desa per kapita sebesar satu persen mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,002 persen. Selanjutnya hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa dampak Dana Desa terhadap kemiskinan di periode 2018-2019 lebih baik dibandingkan dengan periode 2015-2017.
2. Terkait hubungan antara dana desa dan indeks kedalaman kemiskinan (P1), secara umum dalam periode 2015-2019, Dana Desa tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kedalaman kemiskinan. Namun ketika analisis dilakukan dengan menambahkan dummy periode waktu, terlihat bahwa penurunan tingkat kedalaman kemiskinan di periode 2018-2019 lebih baik dari periode 2015-2019.
3. Selanjutnya analisis dampak dana desa terhadap pengeluaran per kapita kabupaten/kota dalam periode 2015-2019 memperlihatkan bahwa elastisitas dana desa terhadap kenaikan pengeluaran perkapita adalah 0.04 persen. Artinya untuk kenaikan Dana Desa per kapita sebesar 1%, maka akan meningkatkan pengeluaran perkapita sebesar 0,04%. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita periode 2015-2017 lebih rendah dibanding periode 2018-2019.
4. Terkait dengan dampak dana desa terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT), dalam periode 2015-2019, terlihat bahwa kenaikan Dana Desa per kapita sebesar 1% menurunkan TPT sebesar 0,0001 poin. Sedangkan untuk analisis perbedaan periode juga terlihat bahwa dampak dana desa terhadap TPT di periode 2018-2019 lebih baik dibanding periode 2015-2017 meskipun sangat kecil perbedaannya.
5. Analisis dampak dana desa terhadap kinerja pelayanan publik yang diwakili oleh indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang merupakan bagian dari indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga memperlihatkan pengaruh yang signifikan. Meskipun dapat diperdebatkan dampak langsung Dana Desa

terhadap indeks Pendidikan dan Kesehatan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa setiap kenaikan Dana Desa per kapita sebesar 1% mampu meningkatkan indeks pendidikan sebesar 0,0021 satuan dan meningkatkan indeks Kesehatan sebesar 0.0022 satuan dalam periode 2015-2019. Selanjutnya analisis perbedaan periode memperlihatkan bahwa dampak Dana Desa terhadap kedua indeks pelayanan tersebut lebih baik di periode 2018-2019 dibanding 2015-2017.

6. Hasil uji efek wilayah menunjukkan bahwa untuk tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan pengeluaran perkapita memperlihatkan bahwa dampak dana desa di Pulau Jawa-Bali signifikan lebih baik dibanding pulau-pulau lainnya. Namun untuk indikator TPT, Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan, dampak dana desa di Pulau Jawa tidak lebih baik dibanding dengan wilayah (pulau) lainnya.
7. Hasil simulasi terhadap formulasi Dana Desa menunjukkan bahwa Semakin kecil proporsi Alokasi Dasar (AD) dalam formula dan diikuti dengan pengalokasian dengan meningkatkan peranan variabel jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, menghasilkan tingkat pemerataan yang semakin baik untuk dua indikator pemerataan (Dana Desa Per Kapita dan Dana Desa Per Penduduk Miskin). Sedangkan peranan Alokasi Afirmasi (AA) ataupun Alokasi Kinerja (AK) dalam pemerataan tidak kuat, dan peningkatan peran AA serta AK justru semakin memperburuk pemerataan baik per kapita maupun per penduduk miskin. Jika dibandingkan AA dan AK, AA lebih kuat dampak pemerataannya dari AK untuk kedua indikator pemerataan.

Rekomendasi

Secara umum hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan formula Dana Desa di periode 2018-2019 membuat kinerja pengalokasian Dana Desa terhadap penurunan kemiskinan, pertumbuhan PDRB, TPT dan indeks Pendidikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengalokasian dengan formula di periode 2015-2017. Berbasis hal itu, maka sangat tepat jika Pemerintah melanjutkan formula pengalokasian periode 2018-2020 dengan pendekatan:

- ☑ Secara bertahap terus menurunkan jumlah Alokasi Dasar dan menaikkan jumlah Alokasi Formula
- ☑ Meneruskan peningkatan peran variabel dalam menentukan target kebijakan. Dengan kata lain, jika penurunan kemiskinan menjadi target utama dari pengalokasian dana desa, maka variabel angka kemiskinan perlu ditingkatkan peranannya dalam alokasi formula

- ✍ Peranan Alokasi Afirmasi dengan mekanisme seperti saat ini cenderung memperburuk pemerataan, sehingga perlu diturunkan peranannya dalam formula keseluruhan.
- ✍ Alokasi Kinerja dalam formula cenderung memperburuk pemerataan, namun harus dipertahankan karena memberi insentif bagi daerah dan desa yang berkinerja baik, dan peningkatan jumlah Alokasi Kinerja perlu dikompensasi dengan memindahkan proporsi alokasi dasar ke alokasi formula.

Terkait dengan target untuk menurunkan kemiskinan, jika dibanding dengan dampak dana Transfer ke Daerah (TKD) terhadap kemiskinan, maka Dana Desa dengan formula pengalokasian periode 2018-2019 lebih kuat pengaruhnya. Dengan kata lain, jika Pemerintah ingin menargetkan penguatan penurunan kemiskinan, maka penambahan Dana Desa dengan melanjutkan metode pengalokasian dan arah pemanfaatan yang jelas, akan menghasilkan penurunan kemiskinan yang lebih kuat dibanding dengan penambahan dana TKD.

Penelitian juga menunjukkan bahwa dampak Dana Desa terhadap kemiskinan di wilayah Jawa-Bali lebih efektif dibanding dengan wilayah lainnya. Untuk itu perlu merancang strategi pemanfaatan Dana Desa yang berbeda antar wilayah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengantar	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	2
1.3. Penelitian Sebelumnya	5
1.4. Formulasi Dana Desa 2015-2020.....	8
1.5. Formula Periode 2015-2017	9
1.6. Perubahan Formula pada 2018 hingga 2020.....	9
BAB II METODE PENELITIAN	11
2.1 Data	11
2.2 Model dan metode analisis	11
BAB III HASIL PENELITIAN	15
3.1 Analisis Deskriptif	15
3.2 Analisis Model Data Panel	25
3.3 Simulasi Formula Dana Desa	33
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	37
4.1. Kesimpulan	37
4.2. Rekomendasi.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Formula Dana Desa	10
Tabel 3.1 Statistik Deskriptif Kemiskinan, Alokasi Dana Desa, Transfer ke Daerah, dan Indeks Kemahalan Konstruksi	15
Tabel 3.2 Perkembangan Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana, Transfer ke Daerah, dan Indeks Kemahalan Konstruksi Berdasarkan Region di Tahun 2015-2019	17
Tabel 3.3 Penerimaan Pemerintah Desa 2014-2019	19
Tabel 3.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin 2015 - 2019	20
Tabel 3.5 Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan 2009 - 2019	20
Tabel 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka 2015 - 2018.....	21
Tabel 3.7 Proporsi Tenaga Kerja Formal dan Informal	22
Tabel 3.8 Perbandingan Perkembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan Tahun 2014 - 2018	24
Tabel 3.9 Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan.....	26
Tabel 3.10 Pengaruh Dana Desa Terhadap PDRB dan TPT	28
Tabel 3.11 Pengaruh Dana Desa Terhadap Pelayanan Publik	29
Tabel 3.12 Hasil Simulasi Berbagai Pilihan Formula Dana Desa.....	34

Daftar Gambar dan Grafik

Gambar 1.2 Dari Dana Desa ke Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Layanan Publik.....	5
Gambar 3.2 Peta Pengaruh Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Periode 2015 - 2019	31
Gambar 3.3 Peta Pengaruh Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Periode 2018 - 2019	32
Gambar 3.4 Peta Pengaruh Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Periode 2015 - 2019	33
Grafik 3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Rata-Rata 2015 - 2019.....	22
Grafik 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota, 2015 - 2019	23

Daftar Lampiran

Lampiran Simulasi 1.1	43
Lampiran Simulasi 1.2	44
Lampiran Simulasi 1.3	45
Lampiran Simulasi 1.4.....	46
Lampiran Simulasi 1.5	47
Lampiran Simulasi 1.6	48
Lampiran Simulasi 1.7	49

DAFTAR SINGKATAN

AA	Alokasi Afirmasi
AD	Alokasi Dasar
AF	Alokasi Formula
AK	Alokasi Kinerja
ADD	Alokasi Dana Desa
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DD	Dana Desa
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
GWR	<i>Geographically Weighted Regression</i>
IKG	Indeks Kesulitan Geografis
IKK	Indeks Kemahalan Konstruksi
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
KOMPAK	Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
PADes	Pendapatan Asli Desa
PDB	<i>Product Domestic Bruto</i>
PDRB	<i>Produk Domestik Regional Bruto</i>
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
TKD	Transfer ke Daerah
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TSP	Tingkat Setengah Pengangguran
UU	Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimulailah era desentralisasi fiskal tahap ke dua di Indonesia dengan adanya dana transfer langsung ke desa yang disebut sebagai Dana Desa (DD). DD mulai dialokasikan pada tahun anggaran 2015 dengan jumlah sebesar Rp 20,7 Triliun. Jumlah tersebut terus meningkat hingga menjadi Rp 72 Triliun di tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat terus sejalan dengan peningkatan pendapatan Negara dan jumlah Dana Transfer ke Daerah karena jumlah Dana Desa ditetapkan sepuluh persen *on top* dana transfer ke daerah.

Dari data *outcome* yang sudah tersedia hingga Juni 2020, era otonomi fiskal Desa dapat dikatakan telah berlangsung selama lima tahun (2015-2019). Berbagai penelitian antar daerah di Indonesia menunjukkan hasil dan dampak yang beragam. Terdapat hasil riset di daerah tertentu menyimpulkan bahwa dana desa tidak menurunkan angka kemiskinan (Setianingsih, 2017). Di sisi lain, juga terdapat hasil penelitian di daerah yang menemukan bahwa dana desa berdampak terhadap penurunan kemiskinan (Daforsa dan Handra, 2019; Annisa dan Seftarita, 2019).

Dana Desa dan jumlah yang semakin membesar dan dengan pemanfaatan yang semakin beragam di tiap Desa, Kabupaten/Kota tentu dapat dimaklumi menghasilkan dampak yang bervariasi antar daerah. Namun, hingga saat ini, belum ditemukan kajian yang meneliti dampak Dana Desa terhadap berbagai indikator utama yang menggunakan data secara nasional. Dengan pengalokasian DD yang telah memasuki tahun ke enam, perlu kajian yang lebih komprehensif untuk menganalisis dampak DD terhadap kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Kajian ini sangat penting untuk dilakukan, sebagai bagian dari evaluasi dan basis untuk membuat kebijakan pengalokasian yang lebih efektif dan efisien.

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

Menganalisis Dampak Dana Desa terhadap kemiskinan, pengeluaran penduduk, pengangguran dan pelayanan publik di Perdesaan dalam periode 2015-2019

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dan menjadi bagian evaluasi pengalokasian Dana Desa secara nasional dan dijadikan sebagai masukan dalam perbaikan pengalokasian dan penggunaan Dana Desa.

Kerangka Teori dan Penelitian Sebelumnya

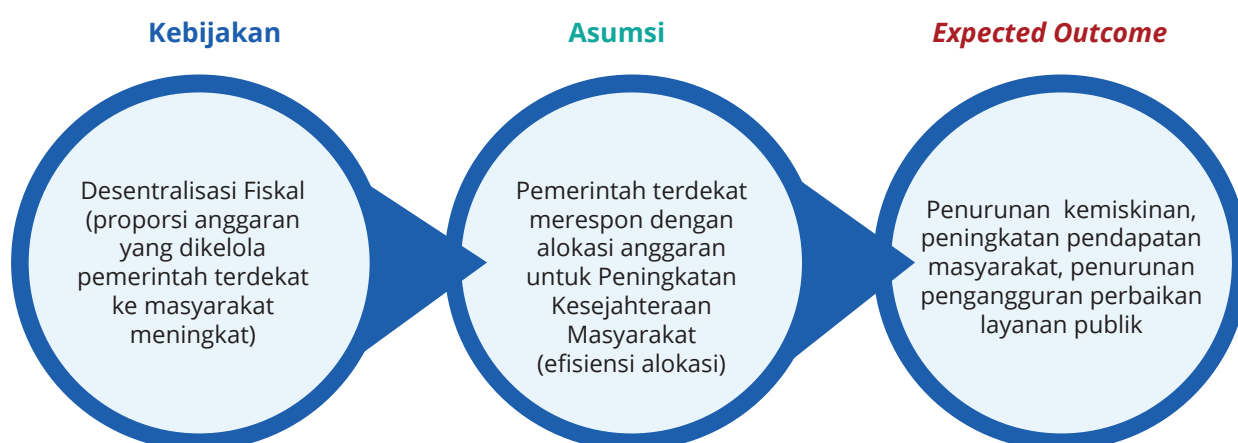
Desentralisasi fiskal gelombang kedua¹, barangkali merupakan terminologi yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di Indonesia sejak diterapkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang mengharuskan Pemerintah untuk mengalokasikan dana di APBN sebesar 10% dana transfer ke daerah untuk Desa. Selain itu, Kabupaten/Kota juga harus mengalokasikan minimum sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterimanya untuk Desa. Kedua jenis dana tersebut (Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota) menyediakan jumlah dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa secara otonom.

Desentralisasi Fiskal dapat diimplementasikan dengan dua pendekatan. Pertama yaitu melakukan desentralisasi kewenangan untuk mengelola pajak. Kedua adalah desentralisasi kewenangan untuk melakukan pengeluaran. Dalam kasus Pemerintahan Desa di Indonesia, pendekatan pertama sangat tidak mungkin untuk dilakukan karena tidak ada penugasan kewenangan perpajakan ke Desa. Yang terjadi hanyalah desentralisasi pengeluaran untuk kewenangan/fungsi tertentu yang didelegasikan ke Desa. Secara umum, kewenangan dari Pemerintahan Desa sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa pada pasal 18, yaitu meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Untuk menjalankan kewenangan ini, akan diikuti dengan pendanaan (*money follows functions principle*) yang ditetapkan pada pasal 72 UU No 6 Tahun 2014.

¹ Desentralisasi Fiskal pertama di Indonesia terjadi tahun 2001, ditandai dengan peningkatan secara drastis dana transfer ke daerah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan desentralisasi kewenangan, terutama untuk pembayaran gaji sekitar 1,1 juta PNS Pusat yang dijadikan PNS Daerah (Handra, 2005).

Dari sudut pandang ekonomi, tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penyediaan layanan publik lokal yang lebih efisien dan efektif. Pendekatan desentralisasi pertama (kewenangan perpajakan) dicapai melalui model penyediaan layanan publik lokal yang dikemukakan Tiebout (1956). Tiebout mengasumsikan rumahtangga mudah berpindah-pindah dan memutuskan untuk tinggal di lokasi yang cocok dengan *preferences* mereka tentang pajak dan barang/jasa yang disediakan. Model tersebut menjelaskan bahwa pemerintah lokal berkompetisi dalam menawarkan tingkat/jenis layanan yang disediakan dan tingkat pajak yang dikenakan dan masyarakat memilih dengan kakinya (*choose by their feet*). Pendekatan kedua dari desentralisasi fiskal dipengaruhi oleh teori desentralisasi Oates yang menyatakan bahwa penyelenggaraan desentralisasi memaksimalkan kesejahteraan sosial karena adanya perbedaan preferensi antara wilayah dan ketiadaan efek *spill-over* (Oates, 1972). Asumsi dari teori Oates adalah bahwa sentralisasi menyediakan barang publik yang seragam dan Pemerintah berjalan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Kedua pendekatan tersebut (Tiebout dan Oates) menyediakan **basis teori untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien melalui kebijakan desentralisasi**. Dengan desentralisasi, alokasi sumberdaya menjadi lebih efisien karena Pemerintah yang terdekat ke masyarakat dapat lebih efektif merespon kebutuhan masyarakat dan penyediaan layanan akan lebih tepat sesuai dengan preferensi masyarakat. Dalam konteks inilah, keberadaan Dana Desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah yang paling dekat ke masyarakat dialokasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Asumsi itulah yang kemudian memunculkan ekspektasi bahwa Dana Desa yang sudah dialokasi sejak 2015 hingga sekarang, akan berdampak terhadap berbagai variabel makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

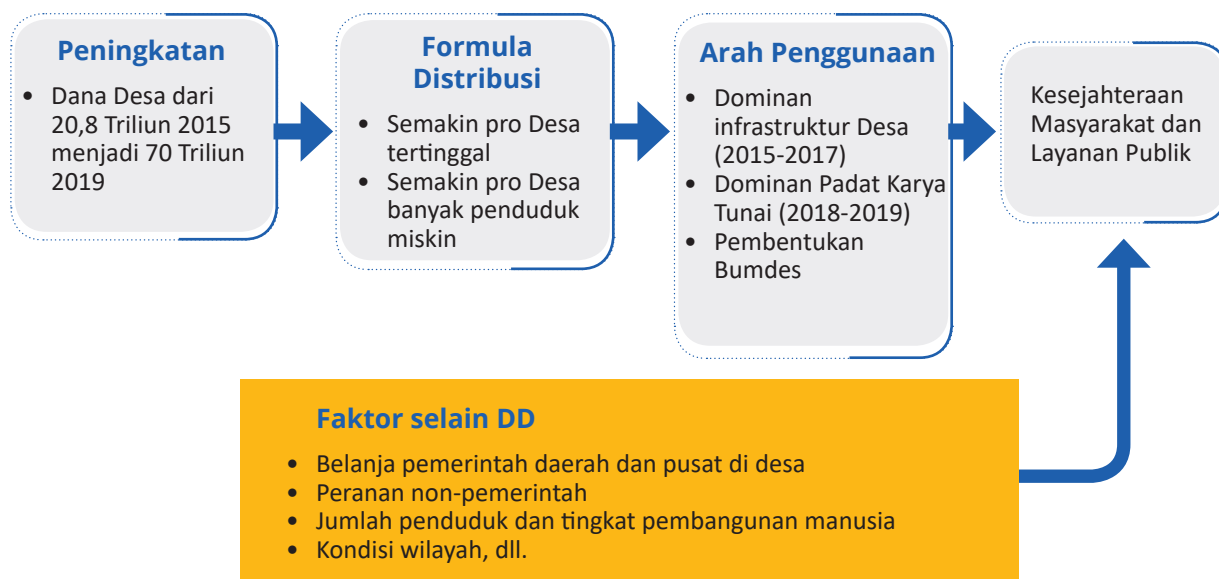


Gambar 1.1 Kebijakan, Asumsi dan *Outcome* yang diharapkan

Transfer dana ke Pemerintahan Desa yang merupakan pemerintahan terdekat ke masyarakat akan meningkatkan kapasitas fiskal desa untuk melaksanakan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan kemudahan transportasi. Seterusnya Dana Desa berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan usaha mikro dan kecil melalui program pemberdayaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi warga desa. Peningkatan kegiatan ekonomi ini pada akhirnya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan di perdesaan.

Upaya optimalisasi dampak Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan layanan publik di daerah perdesaan khususnya, dapat dilakukan paling tidak melalui tahapan (a) formulasi dana desa dan (b) penggunaan dana desa. Tahapan formulasi akan menentukan jumlah dana desa untuk setiap desa. Distribusi yang kurang efisien tentu tidak akan menghasilkan dampak yang optimal. Variasi desa yang sangat lebar satu sama lain menjadi tantangan dalam menetapkan formula. Desa di Indonesia sangat beragam terkait ukurannya, lokasi, dan tingkat kemajuan. Sehingga untuk mencari formula yang *one size fits all* bukanlah sesuatu yang sederhana. Pada akhirnya tujuan dan sasaran dari keberadaan dana desa, serta prioritas dari Pemerintah akan sangat menentukan formula yang tepat.

Distribusi yang optimal saja tentu tidak cukup, karena pada giliran justru penggunaan dan pemanfaatan dana desa yang akan menentukan dampaknya bagi masyarakat. Penggunaan yang lebih dominan untuk yang bersifat konsumtif cenderung memiliki dampak jangka pendek saja. Sementara itu, penggunaan dana yang dominan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan, mungkin baru terasa dampaknya dalam jangka menengah dan Panjang. Variasi penggunaan dana desa antar wilayah akan menentukan dampaknya bagi variabel makro daerah. Meskipun demikian, berkaitan dengan dampak terhadap variabel makro di daerah, tentu dapat dipahami bahwa Dana Desa bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi. Variabel pengeluaran pemerintah selain dana desa, tentu juga akan sangat menentukan karena jumlahnya yang jauh lebih besar dari dana desa. Demikian juga variabel lainya seperti peranan non-pemerintah (swasta dan organisasi non-profit), jumlah penduduk dan tingkat pembangunan manusia, dll.



Gambar 1.2 Dari Dana Desa ke Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Layanan Publik

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam konteks skala ekonomi terdapat potensi inefisiensi dalam pengalokasian dana di level desa tersebut. Pembangunan infrastruktur desa, bisa saja lebih efisien ketika koordinasi lintas desa dilakukan. Pembangunan infrastruktur lintas Desa bisa saja lebih rendah biayanya dari pada tiap Desa membangun sendiri. Penyediaan layanan di Desa bisa lebih rendah biayanya jika beberapa Desa berkolaborasi menyediakan. Ukuran Desa yang lebih kecil akan meningkatkan biaya tetap administrasi, sehingga terdapat potensi Dana Desa di-capture oleh elit Desa untuk. Sehingga ada kemungkinan, desentralisasi fiskal ke level Desa dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi alokasi.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang sudah ada terkait dengan distribusi dana dan formula distribusi dana desa tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Lewis (2015) dan Rochim, dkk (2016) yang menganalisis formula mendistribusikan Dana Desa dan dampaknya terhadap distribusi dana antar Desa di Indonesia. Penelitian ini melanjutkan studi sebelumnya yang dilakukan Tim Ahli KOMPAK (2016) yang fokus kepada analisis formula Dana Desa dan kaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan dengan kesimpulan bahwa “formula Dana Desa menghasilkan distribusi dana yang timpang antar kabupaten/kota dan antar wilayah serta kurang adil jika dikaitkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan peningkatan akses penduduk miskin terhadap layanan publik”.

Selain itu terdapat beberapa penelitian empiris sebelumnya terkait dengan implikasi dari gelombang desentralisasi fiskal kedua di Indonesia. Dengan keterbatasan data dan lingkup penelitian, hasil penelitian yang ada memperlihatkan variasi dari dampak Dana Desa terhadap variable makro seperti pertumbuhan, kemiskinan dan pengangguran.

Penelitian Setianingsih (2017) menganalisis pengaruh pengalokasian dana desa untuk pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Melawi. Penelitian tersebut bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder 169 desa tahun 2015. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengalokasian dana desa untuk pembangunan desa justru meningkatkan angka kemiskinan. Penambahan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebesar 1% menaikkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,398%. Diperkirakan hal ini disebabkan keterlambatan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan tentang penggunaan dana desa, sehingga penggunaannya tidak sesuai rencana. Sementara itu dana desa untuk pembinaan kemasyarakatan desa dan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan meskipun tandanya negatif.

Berbeda dengan hasil penelitian Setianingsih (2017), Daforsa dan Handra (2019) yang meneliti pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menghasilkan kesimpulan bahwa pengalokasian Dana Desa selama tiga tahun untuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan kemasyarakatan berpengaruh signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data kemiskinan dari Dinas Sosial Kabupaten Pasaman tahun 2016-2018 di 37 Desa dan data pengalokasian Dana Desa dari Pemda Kabupaten Pasaman. Data diolah dengan metode regresi data panel.

Sejalan dengan hasil penelitian Daforsa dan Handra (2019), penelitian Annisa dan Seftarita (2019) tentang pengaruh Dana Desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Aceh, menghasilkan kesimpulan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data level Kabupaten/ Kota di Aceh dari tahun 2015 sampai 2017. Data diolah dengan model regresi data panel dengan hasil bahwa variabel Dana Desa menunjukkan arah yang negatif dan signifikan (berpengaruh negatif) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Mulya et al. (2019) dalam penelitian tentang kesenjangan ekonomi di Jawa Barat menghasilkan implikasi yang cukup menarik jika dikaitkan dengan bagaimana Dana Desa sebaiknya didistribusikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di Jawa Barat saat ini lebih disebabkan oleh perbedaan pembangunan fasilitas ekonomi di setiap desa/kelurahan, bukan karena perbedaan status wilayah desa dan lokasinya. Penelitian menggunakan data potensi dan spasial desa dari BPS dan metode analisis yang digunakan adalah analisis skalogram, analisis entropi theil, dan analisis spasial (SIG). Penelitian menunjukkan adanya kesenjangan di dalam wilayah Jawa Barat, baik antar kabupaten/kota, perbatasan/non-perbatasan dan wilayah pesisir/non-pesisir. Penelitian ini merekomendasikan agar masing-masing pemerintah daerah (desa) lebih

mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk menyediakan fasilitas ekonomi yang lebih memadai di desa.

Penelitian dana desa di berbagai negara juga menarik untuk dijadikan perbandingan. Boonperm et al (2013) meneliti tentang dampak dana desa di Thailand. Dana Desa dan Perkotaan di Thailand yang diluncurkan pada tahun 2001 dengan jumlah hampir US \$2 miliar untuk sejumlah 78.000 desa. Pemerintah Thailand menyediakan dana tersebut untuk modal kerja bagi kelompok kredit bergulir yang dijalankan secara lokal. Hasil penelitian yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi 2002 dan 2004 di Thailand menemukan bahwa pinjaman bergulir tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh kelompok miskin dengan lapangan pekerjaan di bidang pertanian di pedesaan. Penelitian juga menemukan bahwa pengembalian pinjaman dana desa tersebut rata-rata lancar. Meskipun demikian, secara umum, kredit perbankan untuk pertanian dan koperasi memiliki efek yang besar bagi peningkatan pendapatan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh pinjaman bergulir dari dana desa terhadap pengeluaran (atau pendapatan) lebih kuat untuk rumah tangga yang berpenghasilan rendah.

Memberikan dana dalam bantuan serta dalam bentuk dana proyek kepada masyarakat pedesaan bukanlah spesifik di Indonesia, tetapi juga dilakukan di banyak negara dengan berbagai tujuan. Sebagian besar tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan standar hidup antara pedesaan dan perkotaan (Do et al, 2016 dan Eom, 2011). Tujuan khusus lainnya dari pemberian bantuan ke pedesaan adalah untuk menjamin terciptanya pekerjaan di daerah pedesaan (Jha et al, 2009), untuk melindungi produsen komoditas (Bulatovic, 2013).

Pemberian dana ke desa tidak selalu mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan dari rancangannya. Program pembangunan pedesaan di Vietnam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan menurut Do et al (2016) kurang berhasil. Program Nasional Vietnam terkait pembangunan pedesaan 2010-2020 yang ditujukan untuk mengembangkan ekonomi pedesaan memang dapat meningkatkan standar hidup masyarakat pedesaan. Namun kesenjangan perkotaan-pedesaan tetap besar. Berbeda dengan kasus di Vietnam, program program pembangunan pedesaan di Korea Selatan dianggap sukses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Eom, 2011).

1.4. Formulasi Dana Desa 2015-2020

Dana Desa didistribusikan ke Desa secara dua tahap seperti yang telah ditentukan oleh UU desa. Pertama adalah dari Pemerintah Pusat ke semua Kabupaten dan Kota yang memiliki desa. Tahap kedua adalah dari setiap Kabupaten atau Kota ke desa. Menurut UU No 6/2014 (penjelasan pasal 72), perhitungan dana desa untuk setiap kabupaten/kota didasarkan pada jumlah desa dan alokasi untuk setiap desa harus didasarkan pada populasi, jumlah orang miskin, area, dan kondisi geografis. UU tersebut juga menjelaskan dua tujuan alokasi dana desa, yaitu (1) untuk meningkatkan kesejahteraan dan (2) untuk pemerataan pembangunan desa. Lebih lanjut tentang formula untuk mendistribusikan dana desa diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016. Kemudian, ada juga Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang prosedur alokasi, transfer dana, penggunaan dana, dan pemantauan dan evaluasi dana.

Ada persamaan dan perbedaan antara formula di setiap tahap. Perbedaan rumus antara tahap pertama (rumus untuk setiap kabupaten / kota) dan tahap kedua (rumus untuk setiap desa) ada pada data yang digunakan untuk mewakili kondisi geografis. Pada awalnya, indeks harga konstruksi (IKK) digunakan, sedangkan pada tahap kedua kondisi geografis diwakili oleh indeks kesulitan geografis (IKG). Data yang digunakan dalam formula disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, baik untuk tingkat Pemda maupun untuk tingkat Desa. Perbedaan lainnya adalah wewenang untuk memutuskan alokasi. Pada tahap pertama, keputusan alokasi dari total dana untuk masing-masing Pemda dibuat oleh Menteri Keuangan. Kemudian, pada tahap kedua, keputusan harus dibuat oleh Bupati / Walikota.

Formula Dana Desa, baik untuk pendistribusian ke Kabupaten/Kota maupun pendistribusian ke Desa, pada awalnya terbagi ke dalam Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF). AD adalah pembagian secara merata ke semua Desa, sedangkan AF adalah pengalokasian berbasis variabel (populasi, area, jumlah penduduk miskin, dan kondisi geografis). Pendistribusian berbasis AD dan AF dilakukan hingga 2017. Formula kemudian mengalami perubahan pada tahun 2018 setelah diperkenalkan komponen Alokasi Afirmasi (AA) di tahun 2018 dan kemudian komponen Alokasi Kinerja (AK) di tahun 2020.

1.5. Formula Periode 2015-2017

Dana Desa pada tahun 2015, 2016 dan 2017, didistribusi menurut Alokasi Dasar sebesar 90 persen dan kemudian menurut variabel (Alokasi Formula) sebesar 10 persen. Dengan kata lain, sebesar 90 persen Dana Desa dibagi rata untuk setiap desa, tanpa mempertimbangkan ukuran desa dan variabel penentu kebutuhan belanjanya. Hanya 10 persen dana dialokasikan berdasarkan formula menggunakan empat variabel yaitu populasi, area, jumlah penduduk miskin, dan kondisi geografis. Distribusi dana dari Pemerintah Pusat ke setiap Kabupaten/Kota berdasarkan AF menggunakan variabel populasi, penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dengan bobot berturut-turut 25%, 35%, 10% dan 30%. Sedangkan AD untuk setiap Kabupaten/Kota ditentukan oleh jumlah desa dan AD untuk tiap desa. Metode yang sama selanjutnya juga digunakan untuk distribusi dana dari setiap Kabupaten/Kota ke Desa dengan perbedaan hanya pada penggunaan indeks kesulitan geografis (IKG) sebagai pengganti IKK.

1.6. Perubahan Formula pada 2018 hingga 2020

Pada 2018, formula untuk mendistribusikan dana diubah. Revisi ini dimaksudkan untuk menyediakan lebih banyak alokasi untuk desa-desa tertinggal dan untuk desa-desa dengan populasi miskin yang lebih tinggi (DJPK, 2018). Ini bisa menjadi respons Kementerian Keuangan terhadap kelemahan formula sebelumnya yang dibahas oleh berbagai penelitian seperti Lewis (2015) dan Handra et al. (2017). Dalam rumus 2018, ada tiga komponen alokasi, (1) Alokasi Dasar (AD), (2) Alokasi Afirmasi (AA) dan (3) Alokasi Formula (AF). Dana untuk alokasi dasar (jumlah yang sama untuk semua desa) dikurangi menjadi 77 persen dari total dana desa. Dana yang dialokasikan berdasarkan variabel (Alokasi Formula) ditingkatkan menjadi 20 persen. Kemudian, sisanya 3 persen dialokasikan untuk desa-desa tertinggal (Alokasi Afirmasi).

Selain itu, ada juga perubahan dalam AF. Bobot masing-masing variabel dalam AF sama sekali berbeda dari rumus sebelumnya. Dalam formula 2018, variabel populasi, penduduk miskin, luas dan indeks harga konstruksi (kesulitan geografis) secara berurutan tertimbang 10%, 50%, 15% dan 25%. Kemudian, untuk setiap tahap, alokasi untuk setiap Pemda atau setiap desa ditentukan oleh tiga komponen, Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi Formula (AF).

Klasifikasi desa untuk AA didasarkan pada Indeks Pengembangan Desa (Indeks Desa Membangun) yang diperkenalkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2015. Indeks ini dikembangkan dari tiga dimensi ketahanan yaitu ketahanan ekonomi, sosial dan ekologis (Kemendes, 2015). Ada 52 indikator yang digunakan dari data Podes 2014 untuk mendapatkan indeks komposit. Berdasarkan indeks, desa diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu:

- ☑ Desa Mandiri (sekitar 174 desa atau 0,24%)
- ☑ Desa Maju (sekitar 3.608 desa atau 4,89%)
- ☑ Desa Berkembang (sekitar 22.882 desa atau 31,04%)
- ☑ Desa Tertinggal (sekitar 33.592 desa atau 45,57%)
- ☑ Desa Sangat Tertinggal (sekitar 13.453 desa atau 18,25%)

Pemilihan Desa penerima AA didahului dengan mengurutkan desa berdasarkan jumlah penduduk miskin dari terkecil ke terbesar. Lalu diambil 30 persen desa dengan penduduk miskin terbesar, dan yang menerima AA hanyalah Desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. Jumlah AA untuk Desa sangat tertinggal lebih besar dari Desa tertinggal.

Untuk Tahun 2019, dengan formula yang sama dengan tahun 2018 dilakukan penurunan Alokasi Dasar menjadi 72%, sehingga pendistribusi dengan Alokasi Formula menjadi 25%, sedangkan Alokasi Afirmasi tetap di 3%. Dengan itu berarti, peranan variabel penentu kebutuhan belanja semakin meningkat, dimana didalamnya termasuk peranan variable jumlah penduduk miskin.

Untuk Tahun 2020, pendistribusian berbasis AD kembali diturunkan menjadi 69% dengan meningkatkan Alokasi Formula menjadi sebesar 28%. Selanjutnya diperkenalkan komponen Alokasi Kinerja (AK) dan tetap mempertahankan komponen Alokasi Afirmasi (AA). Porsi AA di tahun 2019 yang berjumlah sebesar 3% dibagi dua menjadi masing-masing 1,5% untuk AA dan 1,5% untuk AK.

Tabel 1.1 Formula Dana Desa

Tahun	Alokasi Dasar (AD)	Alokasi Formula (AF)	Alokasi Afirmasi (AA)	Alokasi Kinerja (AK)	Bobot variabel dalam AF			
					Populasi	Pddk Miskin	Area	IKG
2015	90%	10%						
2016	90%	10%			0,25	0,35	0,1	0,3
2017	90%	10%						
2018	77%	20%	3%					
2019	72%	25%	3%		0,1	0,5	0,15	0,25
2020	69%	28%	1,5%	1,5%				

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari situs resmi bps.go.id dan djpk.depkeu.go.id, periode 2015-2019, sbb:

- ☑ Dana Desa perkapita per Kabupaten/Kota dan per Provinsi
- ☑ Dana Transfer perkapita ke Daerah per Kabupaten/Kota dan Provinsi
- ☑ Penduduk Kabupaten/Kota dan Provinsi
- ☑ PDRB perkapita Kabupaten/Kota dan Provinsi
- ☑ Pengeluaran perkapita Kabupaten/Kota (komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia)
- ☑ Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi
- ☑ Angka Pengangguran Kabupaten/Kota dan Provinsi (komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia)
- ☑ Indeks Pendidikan dan Kesehatan kabupaten/kota (komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia)

2.2 Model dan metode analisis

Unit Analisis dari kajian ini yaitu level Kabupaten/Kota. Penelitian ini bersifat kuantitatif, baik inferensial maupun deskriptif yang didukung oleh data sekunder selama lima tahun terakhir 2015-2019. Model panel data digunakan untuk melihat pengaruh dana desa terhadap beberapa variabel.

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 dd + \gamma X_{it} + \eta_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Dimana $y_{i,t}$ merupakan variabel terikat (*dependent*) yang dalam analisis ini dilakukan untuk beberapa variabel berbasis ketersediaan data, yaitu jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), pengeluaran perkapita, tingkat pengangguran terbuka, indeks Pendidikan, dan indeks Kesehatan. Indeks Pendidikan dan Kesehatan merupakan representasi dari kebijakan publik.

Variabel *dd* merupakan dana desa yang diterima kabupaten/kota. Vektor $X_{i,t}$ terdiri dari variabel-variabel lain (variabel kontrol) yang datanya tersedia dan juga dapat menjelaskan perubahan variabel terikat. $\eta_{i,t}$ adalah efek individu yang tidak berubah sepanjang waktu (time invariant) dan $\varepsilon_{i,t}$ adalah pengganggu (*error*).

Secara detail, terdapat enam persamaan yang diuji dalam kajian ini, sbb:

$$TK_{i,t} = \beta_{0a} + \beta_{1a} \log(ddcap) + \beta_{2a} \log(tkdcap) + \beta_{3a} \log(pdrbcap) + \beta_{4a} IKK + \beta_{5a} \log(pddk) + \eta_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$P1_{i,t} = \beta_{0b} + \beta_{1b} \log(ddcap) + \beta_{2b} \log(tkdcap) + \beta_{3b} \log(pdrbcap) + \beta_{4b} IKK + \eta_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$PCE_{i,t} = \beta_{0c} + \beta_{1c} \log(ddcap) + \beta_{2c} \log(tkdcap) + \beta_{3c} \log(pdrbcap) + \beta_{4c} IKK + \eta_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$TPT_{i,t} = \beta_{0d} + \beta_{1d} \log(ddcap) + \beta_{2d} \log(tkdcap) + \beta_{3d} \log(pdrbcap) + \beta_{4d} IKK + \eta_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$IP_{i,t} = \beta_{0e} + \beta_{1e} \log(ddcap) + \beta_{2e} \log(tkdcap) + \beta_{3e} \log(pdrbcap) + \beta_{4e} IKK + \eta_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$IK_{i,t} = \beta_{0f} + \beta_{1f} \log(ddcap) + \beta_{2f} \log(tkdcap) + \beta_{3f} \log(pdrbcap) + \beta_{4f} IKK + \eta_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Dimana:

- TK: Tingkat Kemiskinan
- P1: Tingkat Kedalaman Kemiskinan
- ddcap: Dana Desa per kapita
- tkdcap: Transfer ke Daerah (selain Dana Desa) perkapita
- pdrbcap: Produk Domestik Regional Bruto per kapita
- PCE: Pengeluaran Perkapita (salah satu komponen dalam IPM)
- TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka
- IP: Indek Pendidikan (komponen dalam IPM)
- IK: Indek Kesehatan (komponen dalam IPM)

Penelitian ini juga menambahkan *dummy* periode untuk melihat pengaruh perubahan formula dana desa terhadap variabel terikat. Variable yang digunakan adalah *dummy**log(ddcap), dimana *dummy* bernilai 1 untuk periode 2015-2017 dan bernilai 0 untuk periode 2018-2019. Selain itu, untuk melihat variasi variabel terikat berdasarkan wilayah (pulau-pulau besar di Indonesia) juga ditambahkan *dummy* pulau dimana Pulau Jawa-Bali merupakan kategori dasar (*base category*). Terdapat lima variable *dummy* pulau, yaitu:

- Pulau Kalimantan*log(ddcap), dimana pulau Kalimantan bernilai 1 dan pulau Jawa-Bali bernilai 0.
- Pulau Papua*log(ddcap), dimana pulau Papua bernilai 1 dan pulau Jawa-Bali bernilai 0.
- Pulau Maluku-Nusa Tenggara*log(ddcap), dimana pulau Maluku-Nusa Tenggara bernilai 1 dan pulau Jawa-Bali bernilai 0.
- Pulau Sulawesi*log(ddcap), dimana pulau Sulawesi bernilai 1 dan pulau Jawa-Bali bernilai 0.
- Pulau Sumatra*log(ddcaap), dimana pulau Sumatera bernilai 1 dan pulau Jawa-Bali bernilai 0.

Selanjutnya, juga dilakukan analisis respon jumlah penduduk miskin terhadap dana desa pada tingkat provinsi. Model GWR (*Geographically Weighted Regression*) digunakan untuk melihat bagaimana respon jumlah penduduk miskin di masing-masing provinsi terhadap penambahan dana desa. Persamaan regresi yang digunakan dengan metode ini adalah

$$y_{i,t} = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{j=1}^k \beta_j(u_i, v_i) x_{ij,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (8)$$

Dimana:

$\beta_j(u_i, v_i)$: koefisien regresi variabel ke -k pada titik koordinat tertentu

$x_{ij,t}$: variabel independen untuk observasi ke -i pada tahun t dalam hal ini adalah log dana desa perkapita (LDD) dan log Dana Transfer Ke Daerah per kapita (LTKD)

$y_{i,t}$: variabel dependen untuk observasi ke -i pada tahun t dalam hal ini log jumlah penduduk miskin (LPM)

$\varepsilon_{i,t}$: error untuk observasi ke -i pada tahun t

i : 1, 2, ..., n (jumlah wilayah yang diamati dalam hal ini provinsi di Indonesia)

j : 1, 2, ..., k (jumlah variabel independen)

t : 1, 2, ..., t (jumlah series waktu dalam hal ini tahun)

GWR merupakan salah satu variasi dari model regresi spasial. Model GWR akan membuat beberapa persamaan untuk setiap lokasi dimana dalam hal ini adalah provinsi sehingga menghasilkan estimasi parameter yang bersifat lokal. Munculnya persamaan lokal ini merupakan akibat dari penggunaan matrik tertimbang. Matrik tertimbang ini merupakan pembobot spasial antar provinsi. Data yang digunakan untuk menghitung matrik tertimbang ini adalah koordinat masing-masing provinsi. Fotheringham et al. (2002) mengatakan bahwa terdapat beberapa fungsi kernel untuk membangun matrik tertimbang dari data koordinat, dalam hal ini menggunakan *Kernel-bisquare*.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Analisis Deskriptif

3.1.1. Deskriptif Data Kajian

Tabel 3.1 menunjukkan statistik deskriptif tentang perkembangan kemiskinan, penyaluran alokasi dana desa, Transfer ke daerah, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK) untuk seluruh kabupaten/kota yang menerima dana desa pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Rata-rata jumlah penduduk miskin selama tahun 2015 - 2019 untuk seluruh kabupaten/kota yang menjadi sampel adalah 56,90 ribu orang. Jumlah penduduk miskin yang paling rendah di Kabupaten/kota selama tahun 2015 - 2019 adalah 1,34 ribu orang, sedangkan jumlah penduduk miskin terbanyak selama periode tersebut adalah 490,80 ribu orang.

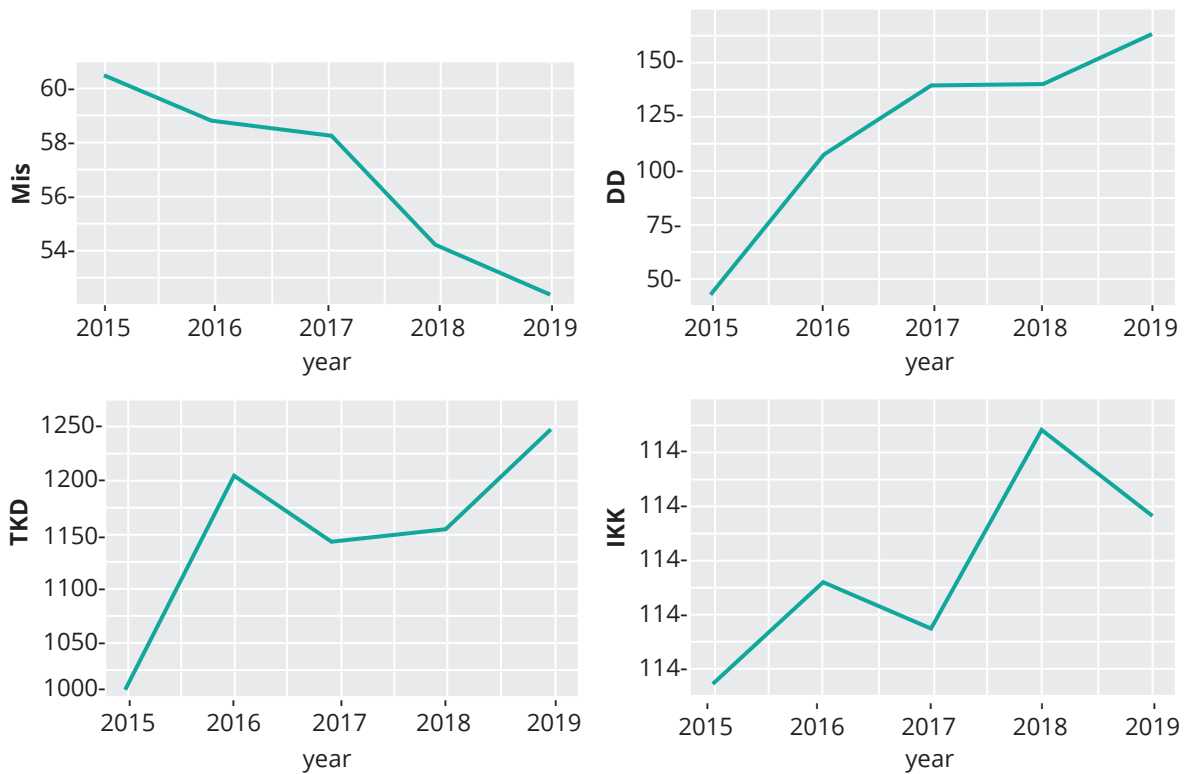
Selama rentang waktu 2015 - 2019, pemerintah telah menyalurkan dana desa kepada kabupaten/kota yang memiliki Desa di Indonesia. Rata-rata dana desa yang telah disalurkan selama periode tersebut adalah 121 miliar rupiah untuk setiap kabupaten/kota. Dana desa paling rendah untuk Kabupaten/kota adalah 4,57 miliar rupiah, sedangkan alokasi terbanyak mencapai 635 miliar rupiah. Disamping dana desa, setiap kabupaten kota di Indonesia juga mendapat dana transfer dari pemerintah pusat. Secara rata-rata selama tahun 2015 - 2019, transfer pemerintah pusat ke daerah mencapai 1,15 triliun rupiah.

Tabel 3.1 Statistik Deskriptif Kemiskinan, Alokasi Dana Desa, Transfer ke Daerah, dan Indeks Kemahalan Konstruksi

Variable	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Mis (Ribu orang)	56.90	63.02	1.34	490.80
DD (Miliar rupiah)	121.00	88.30	4.57	635.00
TKD (Miliar rupiah)	1,152.39	530.30	158.35	5,601.63
IKK (indeks)	111.74	48.07	76.50	498.98

Sumber: olah data

Gambar 3.1 menunjukkan tren rata-rata kemiskinan di kabupaten/kota yang menjadi sampel terus menurun selama tahun 2015 – 2019. Penurunan tren rata-rata kemiskinan kabupaten/kota berbanding terbalik dengan meningkatnya alokasi dana desa dan transfer ke daerah setiap tahunnya. Sementara itu, perkembangan IKK sedikit berfluktuasi dengan tren yang meningkat.



Gambar 3.1 Perkembangan Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana, Transfer ke Daerah, dan Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2015-2019

Berdasarkan wilayah (pulau), tabel 3.2 menunjukkan jumlah penduduk miskin lebih terkonsentrasi di pulau Jawa-Bali. Rata-rata jumlah penduduk miskin di pulau Jawa-Bali selama tahun 2015 – 2019 mencapai 136,33 ribu orang per Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebaran penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Walaupun demikian, jumlah penduduk miskin di pulau tersebut memperlihatkan tren yang menurun. Bahkan penurunan jumlah penduduk miskin di pulau Jawa-Bali lebih besar dibanding pulau-pulau lainnya. Pulau dengan rata-rata jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kalimantan. Namun demikian, penurunan jumlah penduduk miskin di pulau ini paling rendah dibanding pulau-pulau lainnya. Rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin di pulau ini hanya 0,49 persen saja. Disisi lain, penurunan penduduk miskin di Pulau Jawa-Bali mencapai 4,78 persen.

Pengalokasian dana desa juga terkonsentrasi di Wilayah Jawa-Bali kemudian disusul oleh Papua dan Sumatera. Rata-rata alokasi dana desa untuk Jawa-Bali selama periode 2015 – 2019 sebesar 177,85 miliar rupiah per Kabupaten/Kota. Sementara itu, rata-rata alokasi

dana desa untuk Papua dan Sumatera mencapai 119,72 miliar rupiah dan 116,54 miliar rupiah masing-masingnya. Kenaikan alokasi dana desa selama periode 2015 – 2019 relatif sama untuk semua pulau yaitu berada pada kisaran 40 persen hingga 46 persen. Papua merupakan region dengan kenaikan dana desa terbesar yaitu mencapai 46 persen secara rata-rata.

Transfer ke daerah juga menunjukkan pola yang sedikit mirip dengan dana desa. Region Jawa-Bali merupakan daerah yang mendapat transfer paling tinggi, secara rata-rata mencapai 1.679,66 miliar rupiah per Kabupaten/Kota. Kalimantan merupakan region yang mendapat dana transfer kedua terbesar yaitu mencapai 1.145.44 secara rata-rata. Walaupun region Sulawesi dan Maluku-Nusa Tenggara mendapatkan transfer yang relatif lebih kecil, namun peningkatan dana transfer di kedua region ini tumbuh cukup tinggi yaitu mencapai 8,98 persen dan 9,37 persen masing-masingnya.

Sementara itu, indeks kemahalan konstruksi (IKK) menunjukkan bahwa kawasan timur Indonesia merupakan kawasan dengan tingkat kesulitan geografis yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari relatif tingginya nilai IKK untuk Maluku-Nusa Tenggara dan Papua yang masing-masingnya mencapai 105,80 dan 220,83. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur di kawasan ini. Region lain yang memiliki IKK cukup tinggi adalah Kalimantan yang mencapai 106,55. IKK untuk semua region terlihat berfluktuasi. Namun demikian, IKK Kalimantan dan Papua menunjukkan tren yang menurun selama periode 2015 – 2019.

Tabel 3.2 Perkembangan Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana, Transfer ke Daerah, dan Indeks Kemahalan Konstruksi Berdasarkan Region di Tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata	Perubahan (%)
Kemiskinan (Ribu orang)							
Sumatera	40.88	40.39	40.06	38.46	37.58	39.47	-2.07
Jawa-Bali	148.03	143.30	141.51	127.44	121.39	136.33	-4.78
Kalimantan	17.42	17.20	17.39	17.29	17.08	17.28	-0.49
Sulawesi	28.39	27.07	27.10	26.44	25.72	26.94	-2.42
Maluku-Nusa Tenggara	46.60	45.94	45.62	44.42	44.48	45.41	-1.15
Papua	26.14	26.60	26.30	26.62	26.79	26.49	0.62
Dana Desa (miliar rupiah)							
Sumatera	48.42	109.10	139.36	133.29	152.52	116.54	40.78
Jawa-Bali	71.03	159.42	203.44	209.52	245.83	177.85	43.10
Kalimantan	39.16	88.74	113.68	113.29	132.63	97.50	42.86
Sulawesi	34.05	76.75	98.48	98.00	113.75	84.21	42.33

	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata	Perubahan (%)
Maluku-Nusa Tenggara	35.51	80.30	102.44	107.58	126.86	90.54	44.17
Papua	46.09	109.61	139.28	137.95	165.64	119.72	46.00
Transfer ke Daerah (Miliar rupiah)							
Sumatera	917.16	1076.63	1030.10	1010.72	1121.40	1031.20	5.53
Jawa-Bali	1490.61	1725.05	1682.67	1693.78	1806.18	1679.66	5.14
Kalimantan	1052.73	1251.94	1092.95	1115.42	1214.17	1145.44	4.28
Sulawesi	695.26	918.56	864.70	897.59	950.16	865.25	8.98
Maluku-Nusa Tenggara	705.51	909.79	900.24	920.77	987.95	884.85	9.37
Papua	949.91	1156.56	1028.81	1091.57	1190.98	1083.57	6.48
Indeks Kemahalan Konstruksi							
Sumatera	97.37	98.89	97.62	99.42	98.49	98.36	0.30
Jawa-Bali	94.06	99.03	96.97	103.50	103.33	99.38	2.44
Kalimantan	108.07	105.91	104.31	108.25	106.19	106.55	-0.41
Sulawesi	95.54	98.45	97.21	101.82	99.40	98.48	1.04
Maluku-Nusa Tenggara	100.87	104.99	105.60	109.43	108.12	105.80	1.77
Papua	223.43	218.89	221.30	223.37	217.17	220.83	-0.69

3.1.2. Dana Desa dan Berbagai Sumber Pendanaan Pemerintahan Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang terbesar, merupakan dana dari APBN teruntuk Pemerintah Desa, namun tetap dicatat sebagai penerimaan daerah Kabupaten/Kota dan diteruskan sebagai belanja batuan keuangan Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa. Dana terbesar kedua untuk Pemerintah Desa adalah berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan bantuan keuangan Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa dengan jumlah minimum adalah sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat. Sebagian besar Kabupaten/Kota menglokasikan ADD bagi Pemerintah Desa sebelum adanya Dana Desa.

Dana terbesar ketiga sebagai penerimaan Pemerintah Desa adalah bagi hasil pajak dan retribusi yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Ada kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membagi 10% dari penerimaan pajak dan retribusi daerah ke Pemerintah Desa. Penerimaan Pemerintah Desa yang terkecil adalah Pendapatan Asli Desa (PADes) yang pemungutannya dan pengelolannya dilakukan sendiri oleh masing-masing Pemerintah Desa. PADes adalah refleksi dari otonomi desa di sisi penerimaan. Kalau

dilihat data penerimaan Desa di tabel 3, Dana Desa dan ADD sangat dominan sebagai penerimaan desa. Sementara Bagi Hasil dan PADes relatif kecil. Namun secara keseluruhan penerimaan Pemerintah Desa baru mencapai 0,76% PDB pada tahun 2019. Dengan kata lain, jumlah yang dibelanjakan Pemerintah Desa baru mencapai sekitar 0,76 PDB, relatif kecil jika dibandingkan dengan belanja Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang mencapai sekitar 5% PDB dan belanja Pemerintah Pusat yang keseluruhannya diperkirakan mencapai sekitar 9% PDB pada tahun 2019.

Tabel 3.3 Penerimaan Pemerintah Desa 2014-2019

Penerimaan Pemerintah Desa	Dalam Triliun Rp					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dana Desa (Dari Pusat)	-	20.80	46.98	60.00	60.00	72.00
Alokasi Dana Desa (dari Kabupaten/Kota)	17.10	34.20	37.60	40.50	41.10	42.00
Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah	5.72	4.10	4.30	4.90	5.70	6.40
Pendapatan Asli Desa	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
Total	22.82	59.10	88.88	105.40	106.80	120.40
Rata-Rata Per Desa (Rp. Miliar)	0.31	0.79	1.19	1.41	1.43	1.61
Rasio terhadap Produk Domestik Bruto	0.23%	0.51%	0.72%	0.78%	0.73%	0.76%

Sumber: diolah dari data DJPK-Kemenkeu

3.1.3. Tingkat Kemiskinan dan Kedalaman Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel. Penduduk miskin dalam periode 2015-2019 rata-rata mengalami penurunan sebesar 2,6% per tahun. Jika dibandingkan penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan dengan di perkotaan, maka terlihat bahwa penurunan di perdesaan jauh lebih baik dibanding dengan di perkotaan. Kemiskinan di perdesaan turun rata-rata 3,4% pertahun, sedangkan kemiskinan di perkotaan hanya turun rata-rata 1,4% per tahun dalam periode 2015-2019. Selanjutnya jika dibandingkan dua periode yaitu 2015-2017 dengan 2018-2019, terlihat bahwa di perdesaan, penurunan kemiskinan jauh lebih baik di periode 2018-2019. Hal ini menjadi catatan penting terkait dengan perubahan formula Dana Desa. Periode 2018-2019 terjadi perubahan signifikan dalam formula Dana Desa dibanding periode 2015-2017.

Tabel 3.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin 2015 - 2019

Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Pertumbuhan Tahunan		
	2015	2017	2019	2015-2019	2015-2017	2018-2019
Perdesaan	17.917	16.704	15.039	-3,4%	-1,7%	-5,1%
Perkotaan	10.636	10.473	9.926	-1,4%	0,1%	-2,6%
Jumlah	28.553	27.177	24.965	-2,6%	-1,0%	-4,2%

Sumber: diolah dari data BPS.

Selanjutnya jika dilihat data tingkat kedalaman kemiskinan dalam periode 2015-2019, penurunan kedalaman kemiskinan secara rata-rata per tahunnya sama antara perkotaan dan perdesaan. Namun jika diperhatikan penurunan angka P1 mulai tahun 2017 terlihat bahwa penurunan di perdesaan lebih baik dibanding penurunan di perkotaan. Dalam tiga tahun tersebut (2017-2019) terjadi penurunan P1 di perdesaan sebesar 0.56, sementara penurunan P1 di perkotaan hanya sebesar 0.23.

Tabel 3.5 Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan 2009 - 2019

Tahun	Perkotaan		Perdesaan		Keterangan
	P1	Turun	P1	Turun	
2009	1,91		3,05		Tahunan
2010	1,57	-0,34	2,8	-0,25	Tahunan
2011	1,52	-0,05	2,63	-0,17	Tahunan
2012	1,4	-0,12	2,36	-0,27	Semester 1
2013	1,25	-0,15	2,24	-0,12	Semester 1
2014	1,25	0	2,26	0,02	Semester 1
2015	1,4	0,15	2,55	0,29	Semester 1
2016	1,19	-0,21	2,74	0,19	Semester 1
2017	1,24	0,05	2,49	-0,25	Semester 1
2018	1,17	-0,07	2,37	-0,12	Semester 1
2019	1,05	-0,12	2,18	-0,19	Semester 1
Rata-rata		-0,086		-0,087	

Sumber: diolah dari data BPS

3.1.4. Tingkat Pengangguran dan Perekonomian Daerah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Menurut BPS (www.bps.go.id), yang terkategori sebagai penganggur terbuka adalah (a) orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan (b) orang yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha (c) orang yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, (d) orang yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Data didapatkan oleh BPS melalui survei. Orang yang mencari pekerjaan pada saat survei dapat di kelompokkan kepada tiga kategori, yaitu (a) yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, (b) yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, (c) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. Dalam survei BPS juga dijelaskan bahwa mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Namun dalam kaitannya dengan angka pengangguran terbuka, mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka

Seterusnya orang yang bekerja (pekerja) dapat dikategorikan ke dalam pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh dapat dikelompokkan sebagai (i) setengah Penganggur (yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (pernah juga disebut setengah pengangguran terpaksa), (ii) Pekerja Paruh Waktu, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (pernah juga disebut setengah pengangguran sukarela).

Seperti hanya menghitung angka **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**, angka **Tingkat Setengah Pengangguran (TSP)** dihitung dalam persentase jumlah pekerja yang setengah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Dalam periode 2015-2018 terlihat bahwa TPT dan TSP di Indonesia mengalami trend penurunan. Cukup menarik jika membandingkan antara perdesaan dan perkotaan. TPT di perdesaan lebih kecil dari di perkotaan, namun TSP perdesaan hampir dua kali TSP perkotaan. Artinya di perdesaan jumlah pekerja yang terkategori setengah penganggur jauh lebih tinggi dari di perkotaan.

Tabel 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka 2015 - 2018

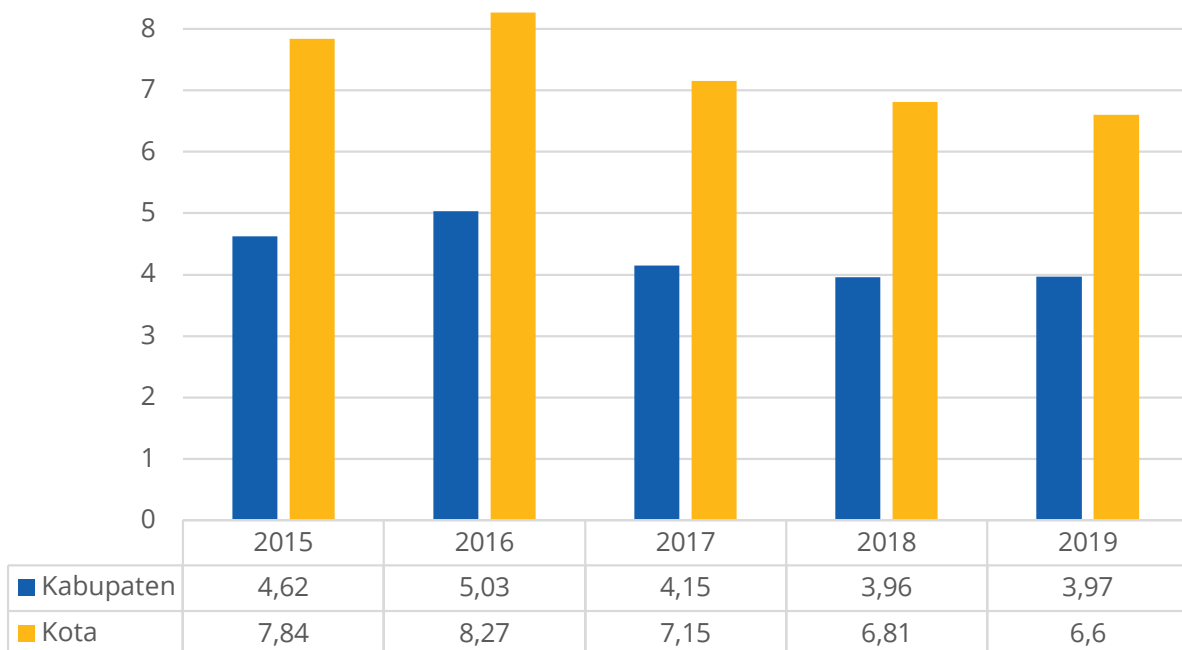
	2015	2016	2017	2018
Tingkat Pengangguran Terbuka				
Perkotaan	7.31	6.6	6.79	6.45
Perdesaan	4.93	4.51	4.01	4.04
Tingkat Setengah Pengangguran				
Perkotaan	5.47	5.08	4.91	4.28
Perdesaan	11.7	10.28	10.52	9.31

Sumber: diolah dari data BPS

Penurunan angka setengah penganggur di perdesaan dari 11,7 di tahun 2015 menjadi 9,31 di tahun 2018 memperlihatkan penurunan sebesar 2,4 poin, yang lebih baik dari

penurunan angka TSP di perkotaan. Jika dibandingkan dengan penurunan TPT, baik di perkotaan maupun di perdesaan tingkat penurunan yang relatif sama dalam periode tersebut. Penurunan TSP di perdesaan yang relatif lebih baik dibanding dengan penurunan di perkotaan, memperlihatkan terjadi perbaikan jam kerja dari pekerja di perdesaan. Hal ini pada gilirannya tentu akan berdampak kepada angka kemiskinan dan juga pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Perbedaan TPT antara wilayah perdesaan dan perkotaan terkonfirmasi dengan perbedaan TPT antara Kabupaten dan Kota. Grafik memperlihatkan bahwa TPT di Kabupaten lebih rendah dari Kota. Artinya secara umum daerah Kabupaten merepresentasikan perdesaan meskipun kita tahu bahwa di Kabupaten juga terdapat wilayah perkotaan.



Grafik 3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Rata-Rata 2015 - 2019

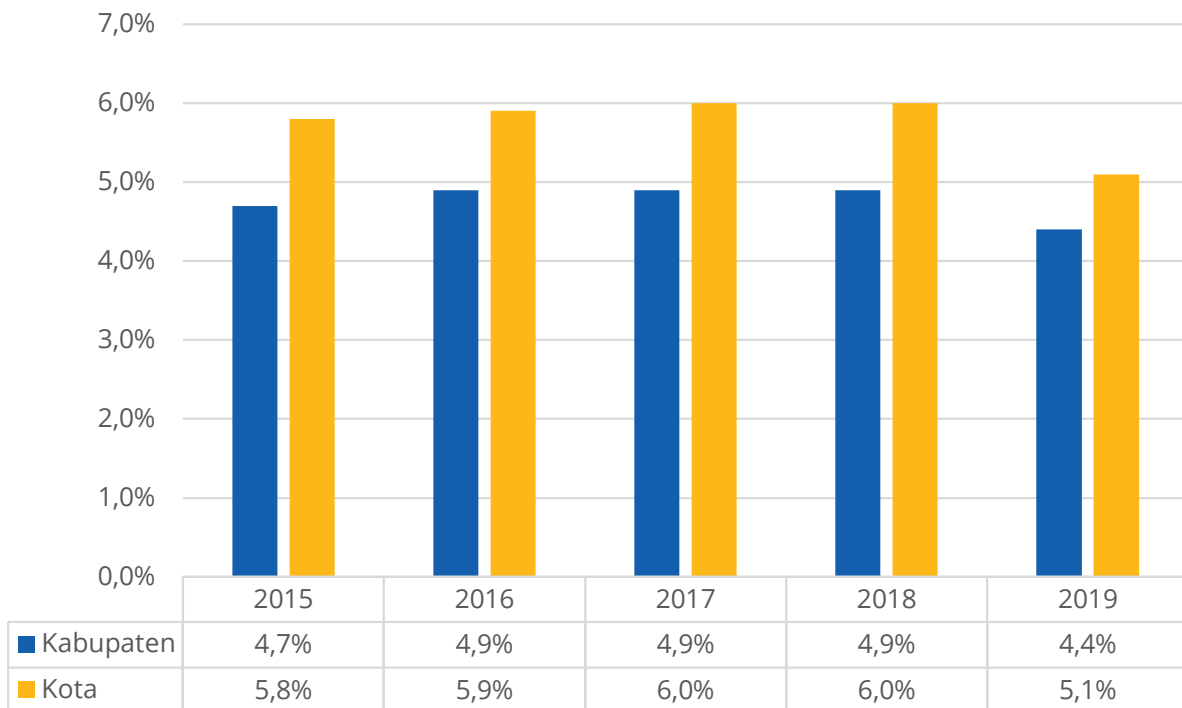
Selanjutnya pada tabel 3.7 juga terlihat bahwa kondisi ketenagakerjaan di wilayah perdesaan ditandai dengan besarnya pekerja sektor informal baik untuk sektor pertanian maupun non-pertanian. Proporsi lapangan kerja informal di sektor non-pertanian di perdesaan juga sangat besar. Namun tren dalam periode 2015-2018 memperlihatkan terjadinya peningkatan presentasi tenaga kerja formal di wilayah perdesaan, sedangkan di wilayah perkotaan justru mengalami penurunan prosentasi tenaga kerja formal. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam periode 2015-2018 terjadi peningkatan prosentasi tenaga kerja formal di wilayah perdesaan dan sebaliknya di wilayah perkotaan.

Tabel 3.7 Proporsi Tenaga Kerja Formal dan Informal

	2015	2016	2017	2018
Persentase Tenaga Kerja Formal				
Perkotaan	57.81	56.31	57.28	56.71
Perdesaan	25.62	27.38	26.95	27.61
Proporsi Lapangan Kerja Informal Non-Pertanian				
Perkotaan	37.74	38.38	38.48	39.07
Perdesaan	55.78	52.55	54.82	54.75

Sumber: diolah dari data BPS

Menganalisis perekonomian daerah dalam periode 2015-2019, grafik memperlihatkan bahwa secara rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi daerah Kota. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya daerah Kota adalah merupakan pusat pertumbuhan wilayah (*center of growth*). Selanjutnya secara umum terlihat bahwa telah terjadi tren penurunan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB harga konstan), baik untuk Kabupaten maupun Kota. Pertumbuhan ekonomi rata-rata semua Kabupaten mengalami penurunan dari 4,7% di tahun 2015 ke 4,4% di tahun 2019, sedangkan Kota mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata dari 5,8% di tahun 2015 ke 5,1% di tahun 2019. Terlihat bahwa penurunan pertumbuhan rata-rata Kota lebih besar dari penurunan pertumbuhan Kabupaten.



Grafik 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota, 2015 – 2019

3.1.5. Perkembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan

Tabel 3.7 memperlihatkan perbandingan jumlah desa/kelurahan dengan sarana prasarannya pada tahun 2014 dengan tahun 2018. Data tersebut diolah oleh BPS dari data potensi desa tahun 2014 (sebelum adanya dana desa) dengan tahun 2018 (setelah adanya dana desa). Meskipun data tersebut adalah gabungan Desa dan Kelurahan, namun jumlah desa yang besar (74.954 Desa berbanding 8350 kelurahan) mengisyaratkan bahwa pertumbuhannya dominan terjadi di Desa.

Untuk fasilitas sanitasi, terjadi perkembangan jumlah Desa/Kelurahan dengan jamban sendiri dan sebaliknya penurunan jumlah Desa/Kelurahan dengan jamban bersama dan jamban umum. Data tersebut mengkonfirmasi terjadinya perbaikan layanan sanitasi di perdesaan. Data tersebut juga sejalan dengan data BPS lainnya tentang proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan untuk wilayah perdesaan yang meningkat tajam dari 47,7% di tahun 2015 menjadi 71,2% di tahun 2019 dalam periode 2015-2019.

Untuk fasilitas sarana dan prasarana olah raga juga terlihat peningkatan jumlah Desa/Kelurahan untuk semua jenis olah raga. Demikian juga untuk sarana dan prasarana perdagangan dan akomodasi, terjadi peningkatan jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki sarana dan prasarana mini market, restoran, toko, hotel dan penginapan. Perbedaan tersebut memperlihatkan terjadinya perbaikan sarana dan prasarana pelayanan di perdesaan di tahun 2018 dibandingkan dengan kondisi tahun 2014. Jika dikaitkan dengan dana desa, tentu ini mengindikasikan kemungkinan peranan dana desa dalam perbaikan tersebut.

Tabel 3.8 Perbandingan Perkembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan Tahun 2014 - 2018

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Sarana dan Prasarana yang Tersedia	2014	2018	Tumbuh Tahunan
Fasilitas Sanitasi			
Jamban Sendiri	57.492	70.477	5,2%
Jamban Bersama	3.513	2.406	-9,0%
Jamban Umum	4.395	3.983	-2,4%
Bukan jamban	16.790	7.065	-19,5%
Jumlah	82.190	83.931	0,5%
Sarana Prasarana Olah Raga			
Sepak Bola	44.698	48.819	2,2%
Bola Voli	54.974	59.785	2,1%
Bulu Tangkis	34.800	35.372	0,4%
Bola Basket	4.995	7.594	11,0%

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Sarana dan Prasarana yang Tersedia	2014	2018	Tumbuh Tahunan
Tenis Lapangan	3.462	5.739	13,5%
Futsal	6.939	12.482	15,8%
Kolam Renang	2.175	5.228	24,5%
Sarana Prasarana Perdagangan dan Akomodasi			
Mini Market	11.468	15.107	7,1%
Restoran/ Rumah Makan	7.505	9.400	5,8%
Warung/Kedai Makanan Minuman	53.224	52.938	-0,1%
Toko/Warung Kelontong	72.845	76.085	1,1%
Hotel	3.464	4.136	4,5%
Penginapan	4.058	5.594	8,4%

Sumber: Data BPS diolah

3.2 Analisis Model Data Panel

Tabel 10 menunjukkan pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan. Sementara itu, pengaruh dana desa terhadap kondisi ekonomi daerah dan pelayanan publik dapat dilihat masing-masing pada table 11 dan 12. Mengingat ketidakterersediaan data pada beberapa kabupaten penerima dana desa, maka jumlah sampel kabupaten yang digunakan adalah 419, kurang dibanding 433 kabupaten/kota penerima dana desa. Hasil uji hausman menyarankan bahwa penduga *fixed effect* merupakan penduga yang terbaik untuk menaksir pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dalam analisis ini. Selanjutnya, masalah *heteroskedasticity* diatasi dengan menggunakan *robust standar error*.

3.2.1. Dana desa dan kemiskinan

Tabel 3.8 menjelaskan hasil estimasi pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) dan indeks kedalaman kemiskinan berdasarkan data tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Secara keseluruhan selama periode 2015 – 2019 dengan mengontrol transfer daerah perkapita, PDRB perkapita, indeks kemahalan konstruksi, dan jumlah penduduk, dana desa per kapita mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.002 persen dan signifikan pada tingkat kepercayaan lima persen (kolom 1). Pada kolom yang sama, PDRB perkapita menurunkan persentase kemiskinan sebesar 0.05 persen dan signifikan pada tingkat kepercayaan satu persen.

Dengan adanya perubahan formula alokasi dana desa di tahun 2018, penelitian ini memasukan interaksi antara *dummy* periode dengan dana desa perkapita. Periode

2015 – 2017 merupakan periode sebelum perubahan alokasi dan periode 2018 – 2019 merupakan periode setelah perubahan alokasi. Estimasi parameter interaksi antara *dummy* periode dan dana desa perkapita menunjukkan bahwa pengaruh dana terhadap penurunan kemiskinan lebih besar pada periode setelah perubahan alokasi dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen. Hal ini membuktikan bahwa perubahan alokasi dana desa memberikan pengaruh terhadap upaya penurunan angka kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota penerima dana desa di Indonesia.

Selanjutnya, untuk melihat apakah terjadi variasi dari pengaruh dana desa berdasarkan pulau, penelitian ini juga memasukkan interaksi *dummy* pulau dengan dana desa perkapita. Dengan menggunakan Pulau Jawa – Bali sebagai basis, kolom 2 menunjukkan bahwa terdapat variasi pengaruh dana desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan berdasarkan pulau di Indonesia. Penurunan tingkat kemiskinan terbesar berada di Pulau Jawa yang kemudian disusul oleh Maluku – Nusa Tenggara, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.

Tabel 3.9 Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Variabel	Tingkat Kemiskinan		Indeks Kedalaman Kemiskinan	
	(1)	(2)	(3)	(4)
log(Dana Desa per kapita)	-0.168*	-1.091**	-0.124	-0.416**
	(0.075)	(0.132)	(0.068)	(0.116)
log(Transfer ke Daerah per kapita)	-0.318	-0.365*	0.363*	0.261
	(0.178)	(0.178)	(0.178)	(0.177)
log(PDRB per kapita)	-5.170**	-0.728	-1.344**	0.652
	(0.608)	(1.000)	(0.474)	(0.622)
IKK	-0.011**	0.001	0.003	0.007*
	(0.004)	(0.004)	(0.003)	(0.003)
log(Jumlah Penduduk)	-7.948**	0.584		
	(1.619)	(1.862)		
Periode*log(Dana Desa per kapita)		0.063**		0.023**
		(0.007)		(0.004)
Pulau Kalimantan*log(Dana Desa per kapita)		1.263**		0.458*
		(0.140)		(0.178)
Pulau Papua*log(Dana Desa per kapita)		0.807**		0.437*
		(0.220)		(0.174)
Pulau Maluku-Nusa Tenggara*log(Dana Desa per kapita)		0.435**		0.391*
		(0.162)		(0.166)
Pulau Sulawesi*log(Dana Desa per kapita)		0.928**		0.169
		(0.131)		(0.151)

Variabel	Tingkat Kemiskinan		Indeks Kedalaman Kemiskinan	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Sumatra*log(Dana Desa per kapita)		0.537** (0.136)		0.290* (0.133)
R-Squared	0.422	0.53	0.029	0.05
Jumlah Observasi	419	419	419	419
Jumlah Grup	2095	2095	2095	2095

Catatan: () robust standar error, ** sig $\alpha = 1\%$, * sig $\alpha = 5\%$

Penelitian ini juga menganalisis hubungan antara dana desa dan kemiskinan melalui indeks kedalaman kemiskinan (P1). Sama seperti sebelumnya, penelitian ini menggunakan dua model untuk melihat pengaruh dana desa terhadap kedalaman kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota. Kolom 3 menunjukkan bahwa dana desa tidak berpengaruh terhadap penurunan kedalaman kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota. Dengan menggunakan informasi pada kolom 3, maka hal ini menyiratkan bahwa untuk keseluruhan periode analisis walaupun dana desa mampu menurunkan tingkat kemiskinan, namun belum berdampak terhadap peningkatan pengeluaran rata-rata penduduk miskin yang ada untuk mendekati garis kemiskinan.

Sementara itu, kolom 4 memprediksi bahwa interaksi antara *dummy* waktu dengan dana desa perkapita menunjukkan hasil yang signifikan. Secara spesifik, pengaruh dana desa terhadap penurunan kedalaman kemiskinan pada periode sebelum perubahan formula alokasi lebih rendah dibanding periode setelah perubahan formula alokasi. Hal ini sejalan dengan kesimpulan sebelumnya yang menyatakan bahwa perubahan formula alokasi berpengaruh baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan.

Pengaruh dana desa terhadap kedalaman kemiskinan juga bervariasi jika dilihat berdasarkan pulau. Dalam hal ini, penurunan kedalaman kemiskinan di Pulau Jawa masih relatif baik dibandingkan pulau lainnya yang kemudian disusul oleh Sumatera dan Maluku – Nusa Tenggara. Sementara itu, alokasi dana desa di Kalimantan dan Papua justru meningkatkan kedalaman kemiskinan.

3.2.2. Dana Desa, Pengeluaran Perkapita, dan Tingkat Pengangguran.

Penelitian ini juga melihat pengaruh dana desa terhadap pengeluaran perkapita kabupaten/kota di Indonesia. Kolom 1 menunjukkan bahwa dana desa mampu meningkatkan pengeluaran perkapita kabupaten/kota sebesar 0.041 persen. Sementara itu, dana transfer justru memiliki pengaruh negative terhadap pengeluaran perkapita kabupaten/kota. Pada sisi lain, PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap kenaikan pengeluaran perkapita.

Interaksi antara dummy periode dengan dana desa menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan pada tingkat kepercayaan satu persen. Kondisi ini membuktikan bahwa pengaruh dana desa perkapita terhadap kenaikan pengeluaran perkapita penduduk kabupaten/kota sebelum perubahan formula alokasi lebih kecil dibanding setelah perubahan formula. Lebih lanjut, interaksi antara dummy pulau dengan dana desa perkapita hanya signifikan untuk pulau Kalimantan dan Sulawesi. Artinya, hanya pulau Kalimantan dan Sulawesi yang memiliki perbedaan dampak dana desa perkapita secara relatif terhadap Pulau Jawa.

Tabel 3.10 Pengaruh Dana Desa Terhadap PDRB dan TPT

Variabel	Log (Pengeluaran Perkapita)		TPT	
	(1)	(2)	(3)	(4)
log(Dana Desa per kapita)	0.041** (0.002)	0.047** (0.003)	-0.011** 0.001	-0.007** 0.002
log(Transfer ke Daerah per kapita)	-0.022** (0.005)	-0.003 (0.004)	0.011* 0.005	0.012** 0.004
log(PDRB per kapita)	0.328** (0.019)	0.092** (0.017)	0.001 0.009	0.013 0.011
IKK	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 0.000	0.000 0.000
Periode*log(Dana Desa per kapita)		-0.003** (0.000)		0.000** (0.000)
Pulau Kalimantan*log(Dana Desa per kapita)		-0.011* (0.005)		-0.004 (0.003)
Pulau Papua*log(Dana Desa per kapita)		-0.008 (0.005)		-0.001 (0.003)
Pulau Maluku-Nusa Tenggara*log(Dana Desa per kapita)		-0.007 (0.004)		-0.005 (0.003)
Pulau Sulawesi*log(Dana Desa per kapita)		-0.012** (0.004)		-0.004 (0.003)
Pulau Sumatra*log(Dana Desa per kapita)		-0.004		-0.007**

Variabel	Log (Pengeluaran Perkapita)		TPT	
	(1)	(2)	(3)	(4)
		(0.003)		(0.002)
R-Squared	0.749	0.865	0.163	0.189
Jumlah Observasi	419	419	419	419
Jumlah Grup	2095	2095	2095	2095

Catatan: () robust standar error, ** sig $\alpha = 1\%$, * sig $\alpha = 5\%$

Sama halnya dengan dampak terhadap kemiskinan, dana desa juga menurunkan tingkat pengangguran di kabupaten/kota secara signifikan. Namun dampak dana desa dalam menurunkan pengangguran tidak sekuat menurunkan kemiskinan. Hal ini tercermin dari koefisien dana desa pada model 1 yang hanya sebesar 0.011. Sementara itu, pengaruh transfer ke daerah terhadap tingkat pengangguran justru positif.

Dengan mempertimbangkan dampak dana desa perkapita berdasarkan periode, walaupun sangat kecil, hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dampak dana desa antara sebelum dan sesudah perubahan formula terhadap tingkat pengangguran. Sementara itu, variasi dampak dana desa terhadap pengangguran berdasarkan pulau tidak begitu terlihat. Hanya pulau Sumatera yang menunjukkan perbedaan dampak dana desa terhadap pengangguran dimana dampak dana desa perkapita terhadap penurunan pengangguran di Sumatera lebih besar dibanding Jawa – Bali.

3.2.3. Dana Desa dan Pelayanan Publik

Penelitian ini juga melihat pengaruh dana desa terhadap kinerja pelayanan publik dari sisi pendidikan dan kesehatan yang diprosikan oleh indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang merupakan bagian dari indikator IPM. Pengaruh dana desa terhadap indeks pendidikan terlihat konsisten untuk semua model. Hal yang serupa juga ditunjukkan oleh pengaruh PDRB terhadap indeks pendidikan. Kolom 2 menunjukkan bahwa perubahan alokasi dana desa berpengaruh terhadap meningkatnya indeks Pendidikan. Sementara itu, variasi pengaruh dana desa berdasarkan pulau hanya terlihat di Pulau Kalimantan dan Maluku – Nusa Tenggara.

Dari sisi indeks kesehatan, dana desa juga berpengaruh positif dalam meningkatkan indeks Kesehatan kabupaten kota. Hal serupa juga ditunjukkan oleh pengaruh PDRB perkapita terhadap peningkatan indeks Kesehatan. Pada kolom 4, perubahan alokasi dana desa juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan indeks Kesehatan kabupaten/kota. Selanjutnya, variasi pengaruh dana desa terhadap indeks Kesehatan berdasarkan pulau hanya terlihat di pulau Maluku – Nusa Tenggara dan Sumatera.

Tabel 3.11 Pengaruh Dana Desa Terhadap Pelayanan Publik

variabel	Indeks Pendidikan		Indeks Kesehatan	
	(1)	(2)	(3)	(4)
log(Dana Desa per kapita)	0.212** (0.014)	0.194** (0.018)	0.220** (0.016)	0.159** (0.023)
log(Transfer ke Daerah per kapita)	-0.041 (0.034)	0.026 (0.028)	-0.146** (0.037)	-0.077** (0.030)
log(PDRB per kapita)	1.807** (0.100)	0.746** (0.091)	1.316** (0.123)	0.061 (0.129)
IKK	0.000 (0.001)	-0.002** (0.001)	0.003** (0.001)	0.001 (0.001)
Periode*log(Dana Desa per kapita)		-0.015** (0.001)		-0.018** (0.001)
Pulau Kalimantan*log(Dana Desa per kapita)		0.061* (0.027)		0.051 (0.037)
Pulau Papua*log(Dana Desa per kapita)		0.008 (0.026)		0.053 (0.036)
Pulau Maluku-Nusa Tenggara*log(Dana Desa per kapita)		0.118** (0.025)		0.228** (0.034)
Pulau Sulawesi*log(Dana Desa per kapita)		-0.011 (0.023)		0.003 (0.031)
Pulau Sumatra*log(Dana Desa per kapita)		-0.008 (0.020)		0.063* (0.027)
R-Squared	0.692	0.784	0.588	0.760
Jumlah Observasi	419	419	419	419
Jumlah Grup	2095	2095	2095	2095

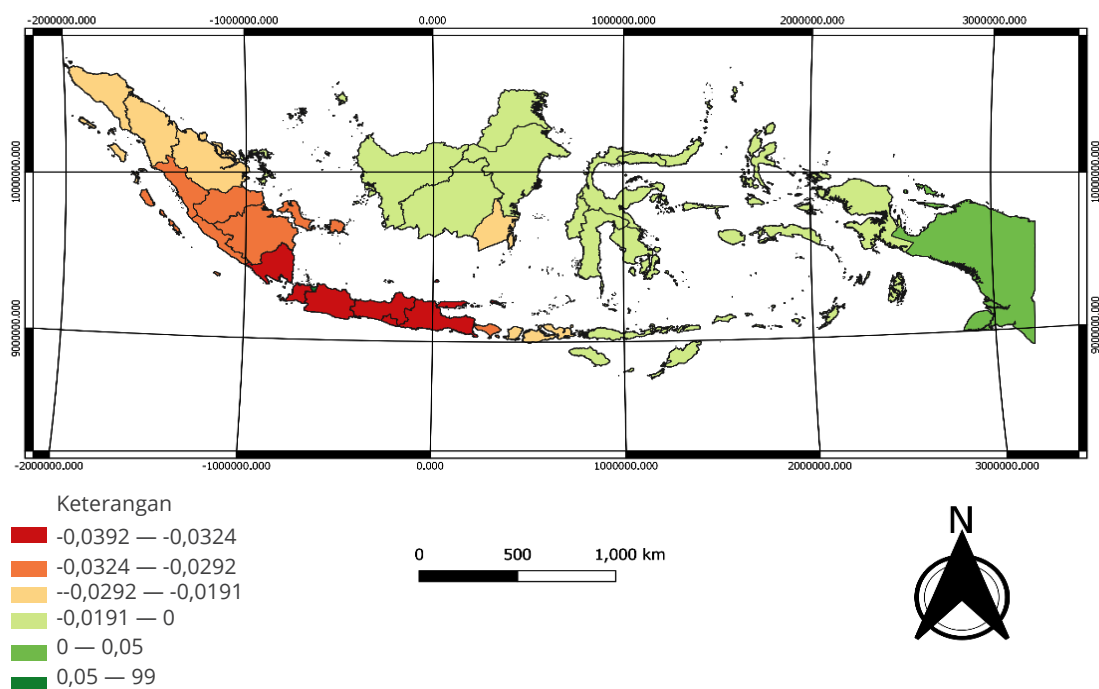
Catatan: () robust standar error, *** sig $\alpha = 1\%$, ** sig $\alpha = 5\%$, *sig $\alpha = 10\%$

3.2.4. Dana Desa dan Kemiskinan (Respon Tingkat Provinsi terhadap alokasi dana desa)

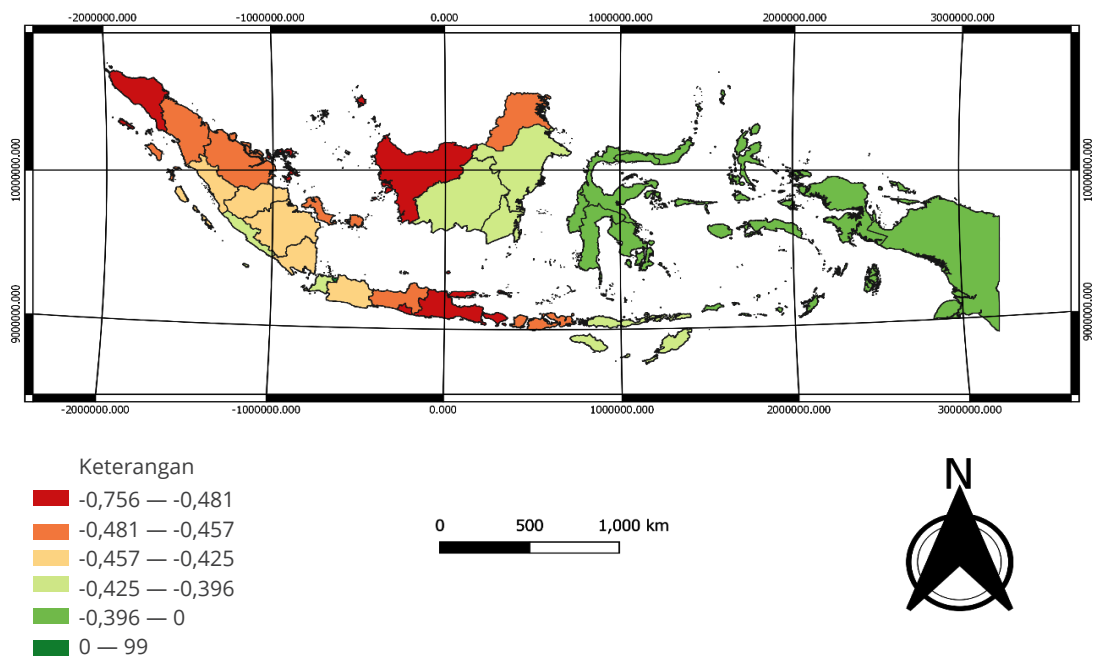
Sebagai pembanding, penelitian ini juga menganalisis pengaruh dana desa terhadap jumlah penduduk miskin perdesaan dengan menggunakan data pada tingkat provinsi. Untuk melihat bagaimana dana desa mempengaruhi tingkat kemiskinan untuk masing-masing provinsi, penelitian ini menggunakan metode GWR (*Geographically Weighted Regression*). Gradasi warna menunjukkan besaran respon dari penurunan penduduk miskin. Semakin merah warna yang terlihat menunjukkan semakin kuat pengaruh dana desa dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, semakin hijau warna yang terlihat menunjukkan semakin lemahnya respon penurunan penduduk miskin.

Seperti sebelumnya, analisis pada tingkat provinsi juga dibagi menjadi tiga subsample. Subsample 1 yaitu periode 2015 – 2017 menunjukkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin semua provinsi di Pulau Jawa merupakan yang terbesar dengan elastisitas berkisar antara 0.032 hingga 0.039. Elastisitas penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup besar dapat pula ditemukan pada provinsi yang ada di pulau Sumatera terutama provinsi Lampung. Elastisitas penurunan kemiskinan di provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan lebih rendah dibanding provinsi Lampung, namun lebih tinggi dibanding Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Gradasi warna menunjukkan bahwa, semakin ke timur, respon tingkat kemiskinan terhadap dana desa semakin melemah.

Gambar 3.2 Peta Pengaruh Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Periode 2015 - 2019

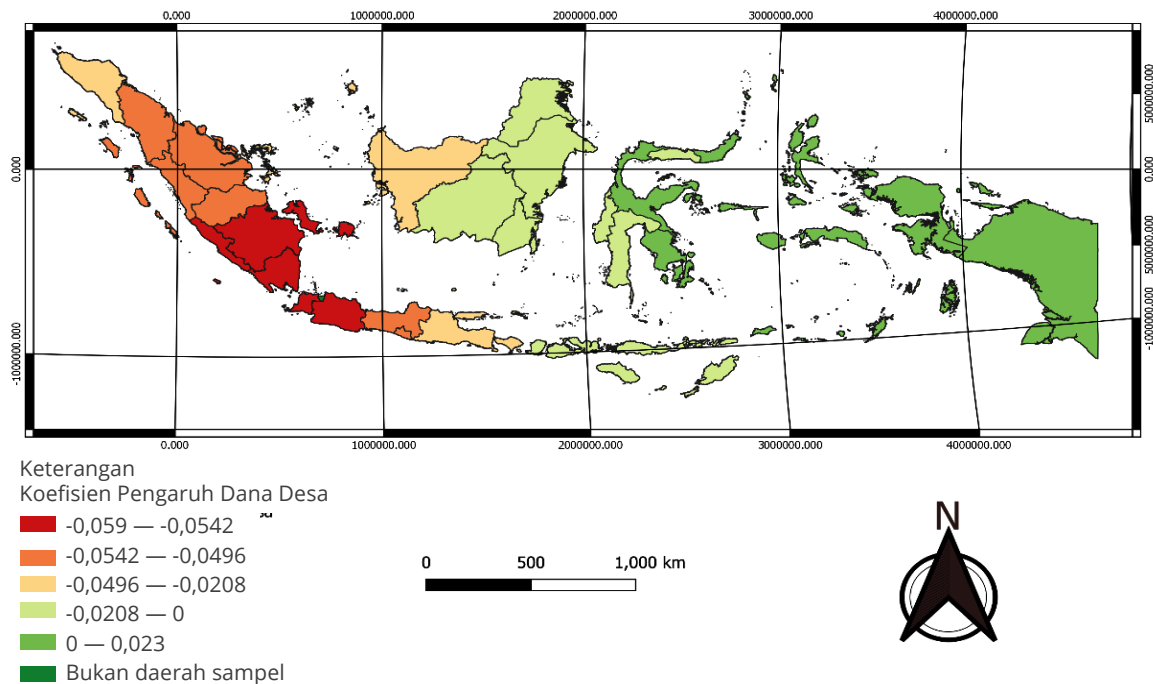


Secara umum, pada periode 2018 – 2019 respon jumlah penduduk miskin terhadap dana desa menunjukkan pola yang serupa dengan periode 2015 – 2017. Namun demikian, jika dilihat lebih detail berdasarkan provinsi, terdapat sedikit perubahan respon dari masing-masing provinsi. Untuk semua provinsi dapat dilihat bahwa elastisitas penurunan jumlah penduduk miskin meningkat drastis dibanding periode sebelumnya. Sebagai contoh, jika pada periode 2015 – 2017 elastisitas paling tinggi di pulau Jawa sekitar 0.032 hingga 0.039, maka pada periode 2018 – 2019 elastisitas penurunan penduduk miskin meningkat hingga rentang 0.048 hingga 0.076.



Gambar 3.3 Peta Pengaruh Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Periode 2018 - 2019

Sementara itu, dengan menggunakan sampel tahun 2015–2019, gambar 3.2 menunjukkan bahwa tidak disemua provinsi alokasi dana desa berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin. Beberapa provinsi yaitu sebagian pulau Sulawesi, seluruh Maluku, dan Papua justru menunjukkan hubungan yang positif antara dana desa dan jumlah penduduk miskin. Pada sisi lain, alokasi dana desa berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin yang ada di provinsi-provinsi yang berada pada Pulau Sumatera dan Jawa. Beberapa provinsi yang mengalami persentase penurunan jumlah penduduk miskin cukup besar adalah Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Banten, dan Jawa Barat. Elastisitas penurunan penduduk miskin di provinsi tersebut berkisar antara 0.054 hingga 0.059. Sementara itu, alokasi dana desa belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin pada semua provinsi di Kepulauan Maluku dan Papua. Elastisitas kenaikan penduduk miskin di provinsi tersebut berkisar antara 0 hingga 0.023 persen.



Gambar 3.4 Peta Pengaruh Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Periode 2015 - 2019

3.3 Simulasi Formula Dana Desa

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dana Desa periode 2015-2019 berdampak kepada penurunan kemiskinan dan pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota. Namun jika diperdalam dengan membandingkan hasil periode 2015-2017 dengan periode 2018-2019 didapatkan kesimpulan bahwa pengalokasian Dana Desa di periode 2018-2019 lebih besar dampaknya terhadap penurunan kemiskinan dan juga pertumbuhan PDRB. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa perubahan formula pengalokasian Dana Desa di tahun 2018 yang menurunkan Alokasi Dasar dan meningkatkan peranan variabel jumlah penduduk miskin dalam pengalokasian adalah arah perubahan yang baik

Simulasi terhadap formula pengalokasian Dana Desa per Kabupaten/Kota dilakukan dengan data 2019 dengan tujuan untuk melihat dampak dari:

- penurunan peran alokasi dasar (AD) dan penambahan peran alokasi formula (AF) terhadap pemerataan.
- peranan Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi Kinerja (AK) terhadap pemerataan
- variabel variabel pada Alokasi Formula terhadap pemerataan

Ada dua Indikator pemerataan yang digunakan dalam menilai dampak tersebut, yaitu pemerataan per kapita dan pemerataan per penduduk miskin. Secara kuantitatif digunakan angka koefisien variasi dan rasio maksimum/minimum untuk menilai.

Koefisien variasi memperlihatkan angka variasi dana desa per kapita (atau per penduduk miskin) yang diterima Kabupaten/Kota. Sedangkan rasio maksimum minimum memperlihatkan perbandingan antara dana desa per kapita (atau per penduduk miskin) yang tertinggi dengan yang terendah. Hasil simulasi dapat dilihat pada lampiran 1-7 dan ringkasannya pada tabel di bawah.

Tabel 3.12 Hasil Simulasi Berbagai Pilihan Formula Dana Desa

No	Skenario	Hasil
1	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Dasar 60%, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, Alokasi Formula Bervariasi Bobot Variabel dalam Alokasi Formula Tetap Seperti Formula DD2020 (Pddk:10%, Pddk Miskin:50%, Luas: 15%, IKK: 25%) 	<ul style="list-style-type: none"> Semakin dikurangi Alokasi Afirmasi (AA) ataupun Alokasi Kinerja (AK) semakin baik pemerataan baik per kapita maupun per penduduk miskin AA lebih kuat dampak pemerataannya dari AK untuk kedua indikator pemerataan
2	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Dasar bervariasi mulai 60% hingga 30%, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja tetap seperti DD2020 Alokasi Formula Bervariasi sejalan dengan penurunan Alokasi Dasar Bobot Variabel dalam Alokasi Formula Tetap Seperti Formula DD2020 	Semakin kecil Alokasi Dasar (AD) semakin baik pemerataan baik untuk kedua indikator (Dana Desa Per Kapita dan Dana Desa Per Penduduk Miskin)
3	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Dasar bervariasi mulai 50% hingga 0, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja tetap seperti DD2020 Alokasi Formula Bervariasi sejalan dengan penurunan Alokasi Dasar Bobot Variabel dalam Alokasi Formula hanya penduduk dan penduduk miskin (Pddk:50%, Pddk Miskin:50%, Luas: 0%, IKK: 0%) 	Semakin kecil Alokasi Dasar (AD) diikuti dengan pengalokasian hanya berdasarkan variabel jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, semakin baik pemerataan untuk kedua indikator (Dana Desa Per Kapita dan Dana Desa Per Penduduk Miskin)
4	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Dasar bervariasi mulai 50% hingga 0, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja tetap seperti DD2020 Alokasi Formula Bervariasi sejalan dengan penurunan Alokasi Dasar Bobot Variabel dalam Alokasi Formula hanya Luas dan IKK (Pddk:0%, Pddk Miskin:0%, Luas:5 0%, IKK: 50%) 	Semakin kecil Alokasi Dasar (AD) diikuti dengan pengalokasian hanya berdasarkan variabel Luas Wilayah dan Indeks Kemahalan Konstruksi, semakin buruk pemerataan untuk kedua indikator (Dana Desa Per Kapita dan Dana Desa Per Penduduk Miskin)
5	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Dasar tetap 50%, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja tetap seperti DD2020, Alokasi Formula tetap 47% Bobot Variabel dalam Alokasi Formula bervariasi dimana peranan Luas dan IKK diturunkan hingga 0% sehingga hanya variabel Pddk dan Penduduk Miskin yang berperan 	Mendukung hasil simulasi 3

No	Skenario	Hasil
6	<ul style="list-style-type: none"> • Seperti Simulasi 5 • Bobot Variabel dalam Alokasi Formula bervariasi dimana peranan Pddk dan Pddk Miskin diturunkan hingga 0% sehingga hanya variabel Luas dan IKK yang berperan 	Mendukung hasil simulasi 4
7	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Dasar 60%, diturunkan 0,5% dan 1% untuk mengkompensasi kenaikan Alokasi Kinerja • AA tetap, Alokas Formula naik 0,5% dan 1% • Bobot Variabel dalam AF Tetap Seperti Formula DD2020 	<p>Menambah proporsi AK meningkatkan ketimpangan</p> <p>Kenaikan AK sebesar 1,5% yang meningkatkan pemerataan dapat dikompensasi dengan penurunan AD sebesar 1%</p>

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, antara lain:

1. Dana Desa periode 2015-2019 berdampak kepada penurunan kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap kenaikan dana desa per kapita sebesar satu persen mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,002 persen. Selanjutnya hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa dampak Dana Desa terhadap kemiskinan di periode 2018-2019 lebih baik dibandingkan dengan periode 2015-2017.
2. Terkait hubungan antara dana desa dan indeks kedalaman kemiskinan (P1), secara umum dalam periode 2015-2019, Dana Desa tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kedalaman kemiskinan. Namun ketika analisis dilakukan dengan menambahkan dummy periode waktu, terlihat bahwa penurunan tingkat kedalaman kemiskinan di periode 2018-2019 lebih baik dari periode 2015-2019.
3. Selanjutnya analisis dampak dana desa terhadap pengeluaran per kapita kabupaten/kota dalam periode 2015–2019 memperlihatkan bahwa elastisitas dana desa terhadap kenaikan pengeluaran perkapita adalah 0.04 persen. Artinya untuk kenaikan Dana Desa per kapita sebesar 1%, maka akan meningkatkan pengeluaran perkapita sebesar 0,04%. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita periode 2015-2017 lebih rendah dibanding periode 2018-2019.
4. Terkait dengan dampak dana desa terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT), dalam periode 2015-2019, terlihat bahwa kenaikan Dana Desa per kapita sebesar 1% menurunkan TPT sebesar 0,0001 poin. Sedangkan untuk analisis perbedaan periode juga terlihat bahwa dampak dana desa terhadap TPT di periode 2018-2019 lebih baik dibanding periode 2015-2017 meskipun sangat kecil perbedaannya.

5. Analisis dampak dana desa terhadap kinerja pelayanan publik yang diwakili oleh indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang merupakan bagian dari indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga memperlihatkan pengaruh yang signifikan. Meskipun dapat diperdebatkan dampak langsung Dana Desa terhadap indeks Pendidikan dan Kesehatan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa setiap kenaikan Dana Desa per kapita sebesar 1% mampu meningkatkan indeks pendidikan sebesar 0,0021 satuan dan meningkatkan indeks Kesehatan sebesar 0.0022 satuan dalam periode 2015-2019. Selanjutnya analisis perbedaan periode memperlihatkan bahwa dampak Dana Desa terhadap kedua indeks pelayanan tersebut lebih baik di periode 2018-2019 dibanding 2015-2017.
6. Hasil uji efek wilayah menunjukkan bahwa untuk tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan pengeluaran perkapita memperlihatkan bahwa dampak dana desa di Pulau Jawa-Bali signifikan lebih baik dibanding pulau-pulau lainnya. Namun untuk indikator TPT, Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan, dampak dana desa di Pulau Jawa tidak lebih baik dibanding dengan wilayah (pulau) lainnya.
7. Hasil simulasi terhadap formulasi Dana Desa menunjukkan bahwa Semakin kecil proporsi Alokasi Dasar (AD) dalam formula dan diikuti dengan pengalokasian dengan meningkatkan peranan variabel jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, menghasilkan tingkat pemerataan yang semakin baik untuk dua indikator pemerataan (Dana Desa Per Kapita dan Dana Desa Per Penduduk Miskin). Sedangkan peranan Alokasi Afirmasi (AA) ataupun Alokasi Kinerja (AK) dalam pemerataan tidak kuat, dan peningkatan peran AA serta AK justru semakin memperburuk pemerataan baik per kapita maupun per penduduk miskin. Jika dibandingkan AA dan AK, AA lebih kuat dampak pemerataannya dari AK untuk kedua indikator pemerataan.

4.2.Rekomendasi

Secara umum hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan formula Dana Desa di periode 2018-2019 membuat kinerja pengalokasian Dana Desa terhadap penurunan kemiskinan, pertumbuhan PDRB, TPT dan indeks Pendidikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengalokasian dengan formula di periode 2015-2017. Berbasis hal itu, maka sangat tepat jika Pemerintah melanjutkan formula pengalokasian periode 2018-2020 dengan pendekatan:

- ☑ Secara bertahap terus menurunkan jumlah Alokasi Dasar dan menaikkan jumlah Alokasi Formula
- ☑ Meneruskan peningkatan peran variabel dalam menentukan target kebijakan. Dengan kata lain, jika penurunan kemiskinan menjadi target utama dari pengalokasian dana desa, maka variabel angka kemiskinan perlu ditingkatkan peranannya dalam alokasi formula
- ☑ Peranan Alokasi Afirmasi dengan mekanisme seperti saat ini cenderung memperburuk pemerataan, sehingga perlu diturunkan peranannya dalam formula keseluruhan.
- ☑ Alokasi Kinerja dalam formula cenderung memperburuk pemerataan, namun harus dipertahankan karena memberi insentif bagi daerah dan desa yang berkinerja baik, dan peningkatan jumlah Alokasi Kinerja perlu dikompensasi dengan memindahkan proporsi alokasi dasar ke alokasi formula.

Terkait dengan target untuk menurunkan kemiskinan, jika dibanding dengan dampak dana Transfe ke Daerah (TKD) terhadap kemiskinan, maka Dana Desa dengan formula pengalokasian periode 2018-2019 lebih kuat pengaruhnya. Dengan kata lain, jika Pemerintah ingin menargetkan penguatan penurunan kemiskinan, maka penambahan Dana Desa dengan melanjutkan metode pengalokasian dan arah pemanfaatan yang jelas, akan menghasilkan penurunan kemiskinan yang lebih kuat dibanding dengan penambahan dana TKD.

Penelitian juga menunjukkan bahwa dampak Dana Desa terhadap kemiskinan di wilayah Jawa-Bali lebih efektif dibanding dengan wilayah lainnya. Untuk itu perlu merancang strategi pemanfaatan Dana Desa yang berbeda antar wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Syarifah dan Seftarita, Chenny, 2019, Pengaruh Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Vol.4 No.4 November 2019, ISSN.2549-8363*
- Bank Indonesia. 2017. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional: Laporan Nusantara Februari 2017. Vol XII Nomor 1.
- Badan Pusat Statistik, 2017. <http://www.bps.go.id/>.
- Daforsa, Ferta and Handra, Hefrizal, 2019, Analysis of village fund management in poverty alleviation at Pasaman Regency, West Sumatra, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 6. No. 6.*
- Fotheringham, A. Stewart., Brundson, Chris., dan Charlton, Martin. 2002. Geographically Weighted Regression The Analysis Of Spatially Varying Relationships. UK: John Wiley & Sons, LTD.
- Handra, Hefrizal, 2016. The implication of Village Fund on Distribution of Fund Between Region in Indonesia. a paper presented at the 13th IRSA International Conference. 25-26 July 2016. Malang.
- Handra, Hefrizal. 2015. A Study of Indonesia's Fiscal Equalisation Mechanism in the Early Stages of Decentralization. Ph.D Thesis. Flinders University of South Australia.
- Lewis, Blane D., 2002. Indonesia. In Intergovernmental Fiscal Transfers in Asia: Current Practice and Challenges for the Future. Smoke P. Kim YH.
- Lewis, Blane D. 2015. Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes. *Public Administration and Development 2015*. Published online in Wiley Online Library

- Martinez-Vazquez J. Vaillancourt F (eds). 2011. Decentralisation in Developing Countries. Global Perspectives on the Obstacles to Fiscal Devolution. Edward Elgar: Cheltenham.
- Mulya, Setyardi Pratika; Rustiadi, Ernan and Pravitasari, Andrea Emma, 2019, Economic Disparities in West Java Based on Village Development Index, a paper presented at the 15th IRSA International Conference, Unsyiah, Banda Aceh.
- Oates, Wallace. 1972. Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich.
- Porcelli, Francesco. 2009. Fiscal Decentralisation and efficiency of government: A brief literature review. Department of Economics - University of Warwick (UK). accessed by June 2017 at: <https://pdfs.semanticscholar.org/d01a/c890a7038b77f9527c9c052491697acf429b.pdf>
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian. Penyaluran. Penggunaan. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Rokhim, R. W. Adawiyah dan M.R. Astrini. 2016. "Kajian Akademik Alternatif Formula Dana Desa." Draft Kajian Article 33.
- Setianingsih, Irma. 2017. Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Malawi. *Jurnal Ekonomi Daerah Vol.5 No.3*.
- Susilowati, Nilam indah, Dwi Susilowati dan Syamsul Hadi. 2017. *Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Bruto terhadap Kemiskinan Kota/Kabupaten di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 1, 514-526.
- Tim Ahli KOMPAK (Hefrizal Handra; Machfud Sidik; Sentor Satria; Suhirman. Erny Murniasih. Devi Suryani. Dylan Robertson), 2017. Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. Analisis Kebijakan. KOMPAK.
- Tiebout, Charles M. 1956. 'A Pure Theory of Local Expenditure'. *the Journal of Political Economy*. Vol.64 Page 416-424.

LAMPIRAN

Lampiran Simulasi 1.1

Perbandingan Hasil Dengan

- ☑ Alokasi Dasar 60%,
- ☑ Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, Alokasi Formula Bervariasi
- ☑ Bobot Variabel dalam Alokasi Formula Tetap Seperti Formula DD2020 (Pddk:10%, Pddk Miskin:50%, Luas: 15%, IKK: 25%)

	Distribusi				Bobot Variabel untuk AF				Indikator Pemerataan: Per Kapita				Indikator Pemerataan: Per Pddk Miskin			
	AD	AA	AK	AF	Pddk	Pdd Miskin	Luas	IKK	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min
DD2020	69%	1.5%	1.5%	28%	10%	50%	15%	25%	639,467	613,956	0.96	80.56	5,718,046	4,851,080	0.85	38.75
Simulasi	60%	1.5%	1.5%	37%	10%	50%	15%	25%	638,969	609,592	0.95	67.52	5,715,490	4,868,757	0.85	32.34
Simulasi	60%	0.0%	1.5%	38.5%	10%	50%	15%	25%	638,360	613,787	0.96	66.37	5,739,681	4,953,240	0.86	31.78
Simulasi	60%	0.0%	0.0%	40%	10%	50%	15%	25%	638,076	613,258	0.96	64.60	5,736,767	4,955,527	0.86	30.91
Simulasi	60%	1.50%	0.00%	38.5%	10%	50%	15%	25%	638,686	609,044	0.95	65.69	5,712,576	4,870,564	0.85	31.44
Simulasi	60%	3.00%	0.00%	37%	10%	50%	15%	25%	639,295	605,653	0.95	66.83	5,688,386	4,788,759	0.84	32.00
Simulasi	60%	0.00%	3.00%	37%	10%	50%	15%	25%	638,643	614,419	0.96	68.20	5,742,595	4,951,800	0.86	32.69

Kesimpulan:

- ☑ Dengan indikator Pemerataan Dana Desa Per Kapita, semakin dikurangi Alokasi Afirmasi (AA) ataupun Alokasi Kinerja (AK) semakin baik pemerataan
- ☑ Dengan indikator Pemerataan Dana Desa Per Penduduk Miskin, semakin dikurangi Alokasi Afirmasi (AA) ataupun Alokasi Kinerja (AK) semakin baik pemerataan
- ☑ Alokasi Afirmasi lebih kuat dampaknya dari Alokasi Kinerja untuk kedua indikator pemerataan

1.3. Lampiran Simulasi 1.2

Perbandingan Hasil Dengan

- ☑ Alokasi Dasar bervariasi mulai 60% hingga 30%,
- ☑ Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja tetap seperti DD2020
- ☑ Alokasi Formula Bervariasi sejalan dengan penurunan Alokasi Dasar
- ☑ Bobot Variabel dalam Alokasi Formula Tetap Seperti Formula DD2020 (Pddk:10%, Pddk Miskin:50%, Luas: 15%, IKK: 25%)

	Distribusi				Bobot Variabel untuk AF				Indikator Pemerataan (Per Kapita)				Indikator Pemerataan (Per Pddk Miskin)			
	AD	AA	AK	AF	Pddk	Pdd Miskin	Luas	IKK	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min
DD2020	69%	1.5%	1.5%	28%	10%	50%	15%	25%	639,467	613,956	0.96	80.56	5,718,046	4,851,080	0.85	38.75
Simulasi	60%	1.5%	1.5%	37%	10%	50%	15%	25%	638,969	609,592	0.95	67.52	5,715,490	4,868,757	0.85	32.34
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	10%	50%	15%	25%	638,416	609,415	0.95	56.38	5,712,651	4,927,638	0.86	28.61
Simulasi	40%	1.5%	1.5%	57%	10%	50%	15%	25%	637,862	614,157	0.96	47.66	5,709,812	5,026,399	0.88	27.57
Simulasi	30%	1.5%	1.5%	67%	10%	50%	15%	25%	637,309	623,705	0.98	40.64	5,706,972	5,162,749	0.90	27.06

Kesimpulan:

- ☑ Semakin kecil Alokasi Dasar (AD) semakin baik pemerataan baik untuk kedua indikator (Dana Desa Per Kapita dan Dana Desa Per Penduduk Miskin)

1.1. Lampiran Simulasi 1.3

Perbandingan Hasil Dengan

- Alokasi Dasar bervariasi mulai 50% hingga 0,
- Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja tetap seperti DD2020
- Alokasi Formula Bervariasi sejalan dengan penurunan Alokasi Dasar
- Bobot Variabel dalam Alokasi Formula hanya penduduk dan penduduk miskin (Pddk:50%, Pddk Miskin:50%, Luas: 0%, IKK: 0%)

	Distribusi				Bobot Variabel untuk AF				Indikator Pemerataan (Per Kapita)				Indikator Pemerataan (Per Pddk Miskin)			
	AD	AA	AK	AF	Pddk	Pdd Miskin	Luas	IKK	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	50%	50%	0%	0%	512,592	369,334	0.72	28.83	4,658,269	2,824,018	0.61	18.28
Simulasi	40%	1.5%	1.5%	57%	50%	50%	0%	0%	485,268	311,312	0.64	20.85	4,431,093	2,381,063	0.54	13.35
Simulasi	30%	1.5%	1.5%	67%	50%	50%	0%	0%	457,944	255,129	0.56	14.66	4,203,917	1,957,936	0.47	9.47
Simulasi	20%	1.5%	1.5%	77%	50%	50%	0%	0%	430,619	202,320	0.47	9.71	3,976,741	1,570,743	0.39	7.10
Simulasi	10%	1.5%	1.5%	87%	50%	50%	0%	0%	403,295	156,344	0.39	6.32	3,749,565	1,253,247	0.33	5.40
Simulasi	0%	1.5%	1.5%	97%	50%	50%	0%	0%	375,971	124,982	0.33	5.41	3,522,390	1,069,437	0.30	4.95

Kesimpulan:

- Semakin kecil Alokasi Dasar (AD) diikuti dengan pengalokasian hanya berdasarkan variabel jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, semakin baik pemerataan untuk kedua indikator (Dana Desa Per Kapita dan Dana Desa Per Penduduk Miskin)

1.1. Lampiran Simulasi 1.4

Perbandingan Hasil Dengan

- ☑ Alokasi Dasar bervariasi mulai 50% hingga 0,
- ☑ Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja tetap seperti DD2020
- ☑ Alokasi Formula Bervariasi sejalan dengan penurunan Alokasi Dasar
- ☑ Bobot Variabel dalam Alokasi Formula hanya Luas dan IKK (Pddk:0%, Pddk Miskin:0%, Luas:5 0%, IKK: 50%)

	Distribusi				Bobot Variabel untuk AF				Indikator Pemerataan (Per Kapita)				Indikator Pemerataan (Per Pddk Miskin)			
	AD	AA	AK	AF	Pddk	Pdd Miskin	Luas	IKK	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	0%	0%	50%	50%	819,102	1,072,991	1.31	158.97	7,459,517	9,377,934	1.26	127.62
Simulasi	40%	1.5%	1.5%	57%	0%	0%	50%	50%	856,992	1,194,790	1.39	199.59	7,828,351	10,552,109	1.35	146.10
Simulasi	30%	1.5%	1.5%	67%	0%	0%	50%	50%	894,883	1,321,517	1.48	250.56	8,197,186	11,758,735	1.43	176.44
Simulasi	20%	1.5%	1.5%	77%	0%	0%	50%	50%	932,773	1,451,884	1.56	312.12	8,566,020	12,988,770	1.52	224.31
Simulasi	10%	1.5%	1.5%	87%	0%	0%	50%	50%	970,664	1,584,992	1.63	387.91	8,934,854	14,236,150	1.59	286.51
Simulasi	0%	1.5%	1.5%	97%	0%	0%	50%	50%	1,008,554	1,720,205	1.71	486.52	9,303,689	15,496,685	1.67	370.63

Kesimpulan:

Semakin kecil Alokasi Dasar (AD) diikuti dengan pengalokasian hanya berdasarkan variabel Luas Wilayah dan Indeks Kemahalan Konstruksi, semakin buruk pemerataan untuk kedua indikator (Dana Desa Per Kapita dan Dana Desa Per Penduduk Miskin)

1.1. Lampiran Simulasi 1.5

Perbandingan Hasil Dengan

- ☑ Alokasi Dasar tetap 50%,
- ☑ Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja tetap seperti DD2020
- ☑ Alokas Formula tetap 47%
- ☑ Bobot Variabel dalam Alokasi Formula bervariasi dimana peranan Luas dan IKK diturunkan hingga 0% sehingga hanya variabel Pddk dan Penduduk Miskin yang berperan

	Distribusi				Bobot Variabel untuk AF				Indikator Pemerataan (Per Kapita)				Indikator Pemerataan (Per Pddk Miskin)			
	AD	AA	AK	AF	Pddk	Pdd Miskin	Luas	IKK	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	10%	50%	15%	25%	638,416	609,415	0.95	56.38	5,712,651	4,927,638	0.86	28.61
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	25%	25%	25%	25%	665,847	690,814	1.04	55.93	6,058,893	5,863,950	0.97	39.77
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	35%	25%	15%	25%	631,983	596,999	0.94	43.47	5,769,611	5,024,316	0.87	33.05
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	35%	40%	10%	15%	588,900	508,154	0.86	40.16	5,342,611	4,125,557	0.77	24.81
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	35%	50%	5%	10%	559,535	449,166	0.80	36.87	5,051,094	3,513,338	0.70	20.91
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	40%	50%	5%	5%	544,530	424,585	0.78	35.17	4,927,002	3,306,847	0.67	20.56
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	50%	50%	0%	0%	512,592	369,334	0.72	28.83	4,658,269	2,824,018	0.61	18.28

Kesimpulan:

Mendukung hasil simulasi 3

1.1. Lampiran Simulasi 1.6

Perbandingan Hasil Dengan

- ☑ Alokasi Dasar tetap 50%,
- ☑ Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja tetap seperti DD2020
- ☑ Alokasi Formula tetap 47%
- ☑ Bobot Variabel dalam Alokasi Formula bervariasi dimana peranan Pddk dan Pddk Miskin diturunkan hingga 0% sehingga hanya variabel Luas dan IKK yang berperan

	Distribusi				Bobot Variabel untuk AF				Indikator Pemerataan (Per Kapita)				Indikator Pemerataan (Per Pddk Miskin)			
	AD	AA	AK	AF	Pddk	Pdd Miskin	Luas	IKK	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	10%	50%	15%	25%	638,416	609,415	0.95	56.38	5,712,651	4,927,638	0.86	28.61
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	0%	40%	25%	35%	699,718	751,883	1.07	76.53	6,272,901	6,269,897	1.00	44.74
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	0%	30%	35%	35%	731,009	846,938	1.16	93.49	6,584,966	7,201,124	1.09	58.65
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	0%	20%	35%	45%	758,446	897,231	1.18	105.50	6,855,934	7,692,239	1.12	71.34
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	0%	10%	45%	45%	789,738	996,800	1.26	130.17	7,168,000	8,648,441	1.21	96.85
Simulasi	50%	1.5%	1.5%	47%	0%	0%	50%	50%	819,102	1,072,991	1.31	158.97	7,459,517	9,377,934	1.26	127.62

Kesimpulan:

Mendukung hasil simulasi 4

1.1. Lampiran Simulasi 1.7

Perbandingan Hasil Dengan

- ☑ Alokasi Dasar 60%,diturunkan 0,5% dan 1% untuk mengkompensasi kenaikan Alokasi Kinerja
- ☑ Alokasi Afirmasi,tetap, Alokas Formula naik 0,5% dan 1%
- ☑ Bobot Variabel dalam Alokasi Formula Tetap Seperti Formula DD2020 (Pddk:10%, Pddk Miskin:50%, Luas: 15%, IKK: 25%)

	Distribusi				Bobot Variabel untuk AF				Indikator Pemerataan (Per Kapita)				Indikator Pemerataan (Per Pddk Miskin)			
	AD	AA	AK	AF	Pddk	Pdd Miskin	Luas	IKK	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min	Rata-Rata	Std Deviasi	Koef Variasi	Rasio Max/Min
Simulasi	60.0%	1.5%	1.5%	37.0%	10%	50%	15%	25%	638,969	609,592	0.954	67.52	5,715,490	4,868,757	0.852	32.34
Simulasi	60.0%	1.5%	0.0%	38.5%	10%	50%	15%	25%	638,686	609,044	0.954	65.69	5,712,576	4,870,564	0.853	31.44
Simulasi	59.5%	1.5%	1.5%	37.5%	10%	50%	15%	25%	638,941	609,466	0.954	66.89	5,715,348	4,870,727	0.852	32.04
Simulasi	60.0%	1.5%	3.0%	35.5%	10%	50%	15%	25%	639,253	610,244	0.955	69.43	5,718,404	4,867,811	0.851	33.29
Simulasi	59.0%	1.5%	3.0%	36.5%	10%	50%	15%	25%	639,197	609,933	0.954	68.12	5,718,120	4,871,261	0.852	32.65

Kesimpulan:

- ☑ Menurunkan proporsi AK dapat memperbaiki pemerataan dan sebaliknya
- ☑ Kenaikan AK sebesar 1,5% yang meningkatkan pemerataan dalam dikompensasi dengan penurunan AD sebesar 1%



ISBN 978-623-6080-44-3 (PDF)



9 786236 080443